



VOLUME XI / NO. 111 / DESEMBER 2016

# MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

## EKONOMI MERATA MASYARAKAT SEJAHTERA

---

APBN 2017 mencerminkan keinginan pemerintah mewujudkan ekonomi inklusif.  
Pemerataan ekonomi diharapkan terasa hingga di penjuru negeri.



# Daftar Isi



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Foto Cover</b><br>Anas Nur Huda | <b>5 DARI LAPANGAN BANTENG</b> |
|                                    | <b>6 EKSPOSUR</b>              |
|                                    | <b>10 LINTAS PERISTIWA</b>     |

**Diterbitkan oleh:** Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nutransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Muhammad Hijrah, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Dovan Wida Pervira, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.*

## LAPORAN UTAMA

- 13** Ekonomi Inklusif Bukan Angan Fiktif
- 16** Infografis
- 18** Akses Merata Rakyat Sejahtera
- 21** Perlindungan Sosial Bagi Semua
- 23** Ekonomi Inklusif Dorong Kesejahteraan Rakyat

## REPORTASE

- 25** Kemenkeu Sabet 3 Gelar di AMH 2016
- 26** Pemerintah Luncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif

## WAWANCARA

- 27** Kesehatan Ibu Kekuatan Bangsa

## POTRET KANTOR

- 30** Kanwil Segudang Prestasi

## FIGUR

- 32** Lakoni Saja

## EKONOMI TERKINI

- 36** Tetap Waspada

## KOLOM EKONOM

- 40** Insentif Fiskal untuk Pemanfaatan Gas Bumi

## GENERASI EMAS

- 44** Raeni dan Becak Sang Bapak

## OPINI

- 46** Bangun Kesadaran Pajak Lewat Branding

## REGULASI

- 48** Jaminan Penerbitan Obligasi Dorong Percepatan Pembangunan Tol Sumatera

## INSPIRASI

- 50** Bahagia Saat Membahagiakan Orang Lain

## RENUNGAN

- 52** Meranggas Bukan untuk Mati

## BUKU

- 53** Generasi Langgas: Millennials Indonesia

## JALAN-JALAN

- 54** Jatuh Hati Pada Suka Hati

## SELEBRITI

- 56** *Work Life Balance*

## 57 BUNG PISKAL



**MEDIA KEUANGAN** adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

**MEDIA KEUANGAN** saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

# lpdp EDUFAIR 2017

CENTRE OF EXCELLENCE



scholarship **seminar** - scholarship **expo**  
art **performances** - free TOEFL test **simulation**  
inspiring **talkshow**

JAN  
31



**JAKARTA**

07.30 - 18.00

DHANAPALA BUILDING, MINISTRY OF FINANCE

online regist : [edufair2017-jkt.eventbrite.com](http://edufair2017-jkt.eventbrite.com)

FEB  
02



**SURABAYA**

07.30 - 18.00

AIRLANGGA CONVENTION CENTRE

online regist : [edufair2017-sby.eventbrite.com](http://edufair2017-sby.eventbrite.com)

FEB  
04



**YOGYAKARTA**

07.30 - 18.00

GRHA SABHA PRAMANA, UGM

online regist : [edufair2017-ygk.eventbrite.com](http://edufair2017-ygk.eventbrite.com)

More Information :



Lpdp Edufair



Lpdp Edufair



@lpdpedufair



@lpdpedufair

## Memeratakan Ekonomi Kita

Selayaknya penerima subsidi, Yanto setiap bulannya menanti pembagian beras jatah (raskin) dari pemerintah. Siang itu, Yanto mengantri di rumah Rukun Tangga (RT) di desanya. Dengan mengeluarkan uang sekitar Rp30.000, dia baru bisa mendapatkan beras sebesar 15 liter setiap bulannya. Padahal, sebagai kepala keluarga, Yanto berhak mendapatkan beras jatah untuk makan keluarga tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Walaupun, beras tersebut seringkali ditukarkan kembali ke toko beras untuk mendapat beras yang lebih baik.

Saat ini, pemerintah memiliki prioritas utama untuk mendesain perekonomian agar dapat tumbuh sehat, inklusif, sehingga mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan

merancang strategi keuangan inklusif. Dengan terwujudnya keuangan inklusif maka akan tercipta kemudahan akses pada lembaga keuangan, terutama untuk 40 persen masyarakat berpendapatan terendah. Melalui keuangan inklusif, ke depannya, pemerintah berharap subsidi bisa tersalurkan secara tepat sasaran.

Presiden Joko Widodo turun langsung untuk mewujudkan ekonomi yang merata (inklusif) di Indonesia. Pada Jumat (18/11) Presiden meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jakarta. Sasaran di dalam SNKI diarahkan secara khusus pada 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Selain itu, juga diarahkan pada wanita, masyarakat di daerah perbatasan

dan pulau-pulau terluar, pelajar, dan pekerja migran Domestik dan Internasional, yang sebagian besar adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tentunya implementasi SNKI diperlukan koordinasi erat antarKementerian atau Lembaga. Selain itu, dibutuhkan juga keterkaitan kuat antar mitra swasta dan akademis, termasuk juga organisasi internasional untuk pencapaian implementasi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan besar bagi terwujudnya perekonomian inklusif, yaitu melalui kebijakan APBN. Sehingga dengan kebijakan fiskal yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

### Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Keuangan inklusif yaitu sistem keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2014, persentase penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan sebesar 36%, target hingga akhir 2019 sebesar 75%. Peningkatan keuangan inklusif mampu mewujudkan perekonomian inklusif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan melawan kesenjangan sosial. Sampaikan optimisme kamu terhadap perekonomian inklusif di Indonesia dengan tagar #OpiniAnda

**LIFE Analyst  
@Steviani29**  
Selain tabungan, edukasi keuangan dan kredit bg petani di bidang perkebunan/tani harus dimudahkan.

**Ratna Keys  
@ratnakeys**  
Dukung para petani, nelayan, UKM; Ciptakan pinjaman bank bunga rendah; tingkatkan EdukasiKeuangan

**Imam Anendro  
@ianendro**  
Ekonomi inklusif tak hanya akan jadi wacana jika tak melibtkn bnyk pihak khususnya masyarakat desa

*tweet*



[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri

## Mengajarkan Nilai

Foto  
Indarto  
Premandaru

Seorang relawan pengajar pada program Kemenkeu Mengajar tengah mengajarkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada murid-murid SD Gunung 05 (Mexico), Jakarta Selatan, Senin (24/10). Kegiatan Kemenkeu Mengajar yang baru pertama kali diadakan berhasil melibatkan lebih dari 600 relawan pegawai dan diselenggarakan serentak di enam kota serta 35 sekolah dasar. Foto ini terpilih menjadi Juara I Lomba Foto dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-70.





# Tradisi Terjaga di Kampung Bena

Foto  
Andi  
Abdurrochim

**M**enenun merupakan tradisi masyarakat Kampung Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang masih terjaga. Motif binatang, seperti gajah dan kuda, menjadi ciri khas tenun Bena. Yang unik dari kain tenun di sana adalah warna-warnanya yang lembut seperti biru muda, terakota, merah dadu, dan ungu pastel. Jika Anda berkunjung ke Kampung Bena, kain-kain indah ini dengan mudah didapati menggantung di teras-teras rumah.



26/10

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Presiden Lantik Kepala PPATK 2016-2021

Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk masa jabatan tahun 2016-2021. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (26/10). Sebagai informasi, Kiagus Ahmad Badaruddin, yang menempuh pendidikan S2-nya di University of Illinois, sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan sejak 1 Juli 2015.



31/10

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Kemenkeu Peringati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selenggarakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Oeang ke-70 yang berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Senin (31/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir sebagai Pemimpin sekaligus Pembina Upacara menegaskan kepada seluruh jajaran Kemekeu bahwa tugas yang diemban sangat penting, yaitu menjaga keuangan negara. “Untuk menghidupkan tanah kita, menghidupkan negara kita, bangsa kita, rakyat kita semuanya. Kita sebagai Penjaga Keuangan Negara harus mampu ikut membangun jiwa, membangun raga bangsa kita untuk Indonesia Raya,” tegasnya.

31/10

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu Lantik Dua Pejabat Eselon I Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat Eselon I Kementerian Keuangan pada Senin (31/10). Kedua pejabat tersebut yaitu Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Awan Nurmawan Nuh sebagai Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak. Pelantikan kepala BKF sifatnya adalah pengukuhan karena sebelumnya Suahasil telah menjabat sebagai pelaksana tugas kepala BKF. Sementara, Awan sebelumnya menjabat sebagai kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I.



02/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu Buka Rakernas DJKN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 2016 pada Rabu (02/11) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas tahun ini mengangkat tema “Tingkatkan Reputasi DJKN dengan Optimalisasi Kekayaan Negara Untuk Perekonomian Nasional”. Dalam arahannya, Menkeu mengungkapkan bahwa ada tiga aspek minimum dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertama, tertib administrasi dan tertib hukum dalam pengelolaan kekayaan negara. Kedua, sertifikasi dan yang ketiga, penilaian/valuasi.



02/11

Teks  
DJBC

Foto  
DJBC

## KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Resmikan E-Seal Control Room

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok terus melakukan inovasi dengan penggunaan *electronic seal (e-seal)*, untuk mempermudah para pengguna jasa dalam melakukan kegiatan importasi. Layanan ini dapat digunakan untuk pemindahan kontainer atau pindah lokasi penimbunan. Pada 1 November 2016, KPU Tanjung Priok juga meresmikan *e-seal control room*, yang akan digunakan petugas sebagai sarana pengawasan secara *real time* terhadap kontainer yang dilekati *e-seal*. Menurut Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Fadjar Donny, melalui *e-seal*, pengawasan terhadap pemindahan lokasi penimbunan barang impor yang belum selesai kewajiban pabeannya, dapat ditingkatkan.

### Agenda

1/12 Kampanye Tax Amnesti untuk UMKM di Thamrin City

6/12 Pemberian Apresiasi kepada K/L dan Instansi Pengelola PNPB oleh Wakil Menteri Keuangan di Dhanapala

7/12 Penyerahan DIPA 2017 oleh Presiden di Istana Negara

1-7/12 Hari Anti Korupsi di Pekanbaru

8-9/12 *Workshop on Unlocking Public and Private Investment in Indonesia: Role of Financial Sector* di Hilton Bali Resort (d/h Grand Nikko) Nusa Dua, Bali

10/12 Rakernas Forum dekom dan pengawas BPD di Makassar

10/12 ASEAN+3 Finance Deputies Meeting, Tingkok 10-11 Desember 2016 di Guiyang, RRT

11/12 Perayaan natal Kemenkeu 2016 di Gedung Dhanapala

14/12 Seminar Riset Pengaruh Investor Asing Terhadap Pasar Sun Domestik



02/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu Buka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 2016

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Rapimnas tahun ini mengangkat tema “Kerja Nyata Memantapkan Peran *Treasury* dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Kredibilitas Keuangan Negara”. Dalam sambutannya, Ia menekankan bahwa Kemenkeu setiap hari melakukan perubahan dan berevolusi menjadi lebih baik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga harus selalu mengedepankan keterbukaan, inovasi perbaikan Kompetensi.



03/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## Menkeu Terima *Public Health Leadership Award*

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima penghargaan Public Health Leadership Excellence Sulianti Saroso Award dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Penghargaan diserahkan pada acara Kongres Nasional IAKMI XIII di Makassar, Kamis (03/11). Dalam keynote speechnya, Menkeu menyatakan bahwa aspek kesehatan merupakan aspek strategis bagi semua negara di dunia. Semua negara, baik maju maupun berkembang, termasuk Indonesia, ingin menciptakan Universal Health Coverage (UHC). UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan (financial hardship).

18/11

Teks  
Biro KLI

Foto  
Biro KLI

## DJBC dan BNN Gagal Penyelundupan 100 kg Narkotika

Bertempat di Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan terkait penyelundupan sabu-sabu seberat 100 kilogram, dan *Happy Five* sebanyak 300.250 butir. Upaya penyelundupan narkotika asal Taiwan yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika internasional, berhasil digagalkan oleh BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menkeu memberikan apresiasi kepada BNN, DJBC serta TNI atas kerjasama dan koordinasi dalam menggagalkan penyelundupan ini. “Dengan menyita barang sebanyak ini, yang dapat mengancam 1 juta masyarakat Indonesia, kita sudah menyelamatkan generasi muda bangsa,” kata Menkeu. Sepanjang tahun 2016, upaya penyelundupan narkotika yang digagalkan DJBC sampai dengan November 2016, ada 223 kasus, dengan barang bukti yang didapat sebanyak 1.072,55 kg.



Dengan pemerataan ekonomi, pembangunan sarana infrastruktur seperti Jembatan Bareleng di Batam ini dapat juga dilakukan di berbagai daerah lain.

Foto  
Agung  
Ardhianto

# Ekonomi Inklusif Bukan Angan Fiktif

Presiden Joko Widodo meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11). Keberadaan SNKI sejalan dengan cita-cita pemerintah mewujudkan ekonomi inklusif. Dengan ekonomi yang merata, pembangunan diharapkan bisa menciptakan kesejahteraan hingga di seluruh penjuru nusantara. SNKI merupakan buah koordinasi antara Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Enam pilar menjadi penopang SNKI, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen. Presiden Jokowi mengatakan tugas untuk mengawal implementasi masing-masing pilar sudah dibagi, tetapi sinergi di antara lembaga

yang terlibat tetap diperlukan. “Turun langsung ke lapangan, lihat hambatannya, dan langsung selesaikan, carikan solusinya,” ujar Presiden.

Pemerintah terus berupaya agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem keuangan nasional. Data pada 2014 menunjukkan bahwa indeks keuangan inklusif Indonesia masih sebesar 36 persen. “Artinya masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan. Masih banyak yang belum mempunyai tabungan. Masih banyak yang sulit mendapat akses kepada pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan,” kata Presiden.

Peningkatan keuangan inklusif merupakan upaya pemerintah mendorong tercapainya ekonomi inklusif yang mendorong terjadinya pengurangan secara signifikan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. “Meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan kita melawan kemiskinan dan melawan kesenjangan sosial. Ketika makin banyak rakyat dapat mengakses layanan perbankan, hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya lebih baik,” ujar Presiden.

**Empat prasyarat**

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di kantor Bank Dunia Indonesia, Jakarta, *Lead*

*Economist* Bank Dunia Indonesia Vivi Alatras mengungkapkan bahwa ada empat prasyarat yang harus diperhatikan pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Keempat prasyarat itu perlu dikaitkan dengan kondisi perlambatan pengentasan kemiskinan dan tantangan mengatasi ketimpangan.

Prasyarat pertama yang harus dipenuhi adalah mengatasi *unequal opportunity*. Menurut Vivi, di Indonesia nasib seseorang masih dipengaruhi oleh tempat di mana dia dilahirkan dan siapa orang tuanya. Perbedaan fasilitas di kawasan Indonesia barat dan timur, misalnya, terkadang sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan anak-anak Indonesia.

Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama. “Pelayanan publik yang berkualitas untuk siapa saja dan di mana saja harus dapat diberikan pemerintah,” ujar Vivi.

Prasyarat kedua adalah bagaimana memberikan upah yang baik pada tiap level tenaga kerja. Persoalan bidang ketenagakerjaan yang lain, lanjut Vivi, melingkupi pemberian pelatihan dan penciptaan lapangan kerja yang memenuhi kebutuhan.

Kemampuan untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan miskin menjadi prasyarat ketiga. “Orang miskin di Indonesia itu *gantian*, padahal yang kita

ingin adalah masyarakat yang sudah keluar dari garis kemiskinan tidak akan masuk lagi. Ternyata kerentanan terhadap kemiskinan cukup tinggi,” kata Vivi. Persoalan masyarakat rentan miskin ini perlu dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk mencegah terjadinya berbagai macam bencana atau menangani bencana dengan cara yang tepat. Pemerintah dipandang perlu membuat sistem perlindungan sosial yang bukan hanya bisa menanggulangi, melainkan juga mencegah masyarakat rentan miskin tergelincir ke garis kemiskinan.

Prasyarat keempat adalah pembenahan kebijakan fiskal, termasuk subsidi. “Jika kebijakan subsidi dilakukan dengan memperhatikan bagaimana dampak distribusinya terhadap masyarakat, maka itu bisa mengurangi ketimpangan yang terjadi dengan sangat signifikan,” ujar Vivi. Kebijakan menghapus subsidi BBM adalah langkah tepat. “Yang harus dilindungi adalah orangnya. Adil itu justru pada saat orang yang lebih berhak mendapatkan subsidi lebih banyak,” kata dia menambahkan. Di samping itu, pemerintah dinilai perlu memiliki sistem *monitoring* yang bagus untuk dapat memastikan subsidi di lapangan secara tepat menysasar masyarakat rentan miskin dan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Di Indonesia, terdapat masyarakat dalam golongan 40 persen terbawah ekonominya dengan tingkat kemungkinan menjadi miskin masih signifikan. Golongan ini perlu mendapat perhatian pemerintah yang lebih. Menurut Vivi, komitmen pemerintah untuk mengurangi kemiskinan demi mendorong pemerataan sudah cukup tinggi. “Memang ini bukan pekerjaan yang gampang. Sering kali yang menjadi soal adalah implementasinya,” kata Vivi. Beberapa program dengan alokasi anggaran besar seperti pendidikan, infrastruktur, dan dana desa perlu dijaga pelaksanaan anggarannya. “Ada berbagai macam kartu seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ini perlu dipastikan *supply side*-nya juga tersedia,” ujarnya lagi.

Vivi juga menekankan terwujudnya ekonomi inklusif memerlukan kehadiran seluruh elemen

masyarakat. Dia melihat pemerintah telah berjalan pada jalur yang tepat. Cita-cita mewujudkan pemerataan pendidikan bukan lagi impian semata. “Saya ingin menekankan yang harus hadir bukan hanya pemerintah. Pemerintah punya kepentingan untuk mengajak semua pihak untuk hadir karena ini butuh keselarasan langkah bersama antara pemerintah dengan *private sector*, komunitas, kelompok *think thank*, dan lain-lain,” kata Vivi.

**Perbaikan subsidi**

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegro, pemerintah memberikan perhatian khusus pada upaya menciptakan ekonomi inklusif. Perbaikan kualitas belanja APBN menjadi salah satu solusinya. “Kalau anggarannya makin besar untuk pemberantasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran *kan* jadi lebih bagus kualitas belanja dalam APBN. Pendapatan masyarakat membaik secara perkapita, sehingga itu dapat menciptakan permintaan dengan sendirinya,” kata Bambang yang ditemui Media Keuangan di kantor Bappenas awal pekan di bulan ini.

Pemerintah saat ini berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan pembanguan yang bisa sejalan dengan tujuan penanggulangan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan ketimpangan. Ketimpangan yang berusaha ditangani pemerintah, menurut Bambang, mencakup ketimpangan kelompok pendapatan dan ketimpangan antarwilayah. “Jika kita bicara pembangunan yang inklusif, jadi intinya tidak boleh di negara ini ada warga negara atau pihak-pihak yang tidak diperhatikan pemerintah. *Kan* inklusif itu artinya semua terlibat, semua merasakan dampaknya,” ujar Bambang.

Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, Bappenas berperan dalam menyusun program-program yang bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Program-program tersebut kemudian akan diterjemahkan oleh berbagai kementerian dan lembaga. “Kami mengupayakan agar belanja kementerian dan lembaga itu secara tidak langsung membantu mengatasi masalah-masalah tadi,” lanjutnya.

**Implementasi dalam APBN 2017**

Sebagai tindak lanjut perbaikan kebijakan subsidi, pada tahun depan, pemerintah akan melakukan uji coba pemberian bantuan langsung dalam bentuk subsidi beras sejahtera di 44 kota. “Jadi akan langsung diberikan kepada penerima, yaitu ke rumah tangga yang membutuhkan. Tidak dalam bentuk subsidi harga beras,” kata Bambang. Di samping beras, pemerintah juga berkomitmen

untuk mengarahkan sebanyak mungkin subsidi ke rumah tangga penerima.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di level ekonomi 40 persen terbawah melalui APBN 2017. “Jadi kita tetap mencapai tujuan APBN, yaitu belanja untuk infrastruktur, belanja untuk prioritas pendidikan, kesehatan, memperbaiki kesejahteraan mayarakat terutama di level 40 persen terbawah, menjaga kondisi Indonesia dalam menghadapi kemungkinan bencana alam. Namun pada saat yang sama, kita tidak melakukan ekspansi dengan menambah belanja terlalu banyak,” kata Menkeu dalam kesempatan bertemu media pertengahan bulan ini.

APBN 2017, lanjut Menkeu, menerapkan prinsip kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap menjaga kehati-hatian. Untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi belanja barang. “Kebijakan fiskal kita adalah ekspansif namun tetap dalam prinsip kehati-hatian. Itu hanya bisa dilakukan tanpa membuat fiskal menjadi tidak *prudent* adalah melalui efisiensi belanja barang,” ujarnya.

Dengan efisiensi belanja barang, pemerintah berharap tetap dapat mencapai tujuan APBN dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, serta mitigasi bencana.

Untuk mengoptimalkan pemerataan ekonomi, dari sisi transfer ke daerah besarnya dalam APBN 2017 sudah mendekati belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini dikarenakan, banyak fungsi pemerintah pusat yang sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. “Jadi sekarang perimbangan antara pusat dan daerah telah dan akan terus dilakukan, karena sekarang peranan dari pemerintah pusat memang hanya terbatas pada fungsi-fungsi yang tidak didelegasikan,” kata Menkeu.

# Keuangan Inklusif di Depan Mata

Sumber:  
Peraturan Presiden  
No. 82 Tahun 2016  
Tentang Strategi Nasional  
Keuangan Inklusif

## Peran

Pemerintah berkomitmen untuk mencapai keuangan inklusif. Kemudahan dan besarnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas merupakan perwujudan dari sistem keuangan inklusif. Melalui sistem keuangan inklusif, kemampuan ekonomi masyarakat meningkat sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

- mendorong pertumbuhan ekonomi
- menciptakan stabilitas sistem keuangan
- mendukung program penanggulangan kemiskinan
- mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah

## Sasaran

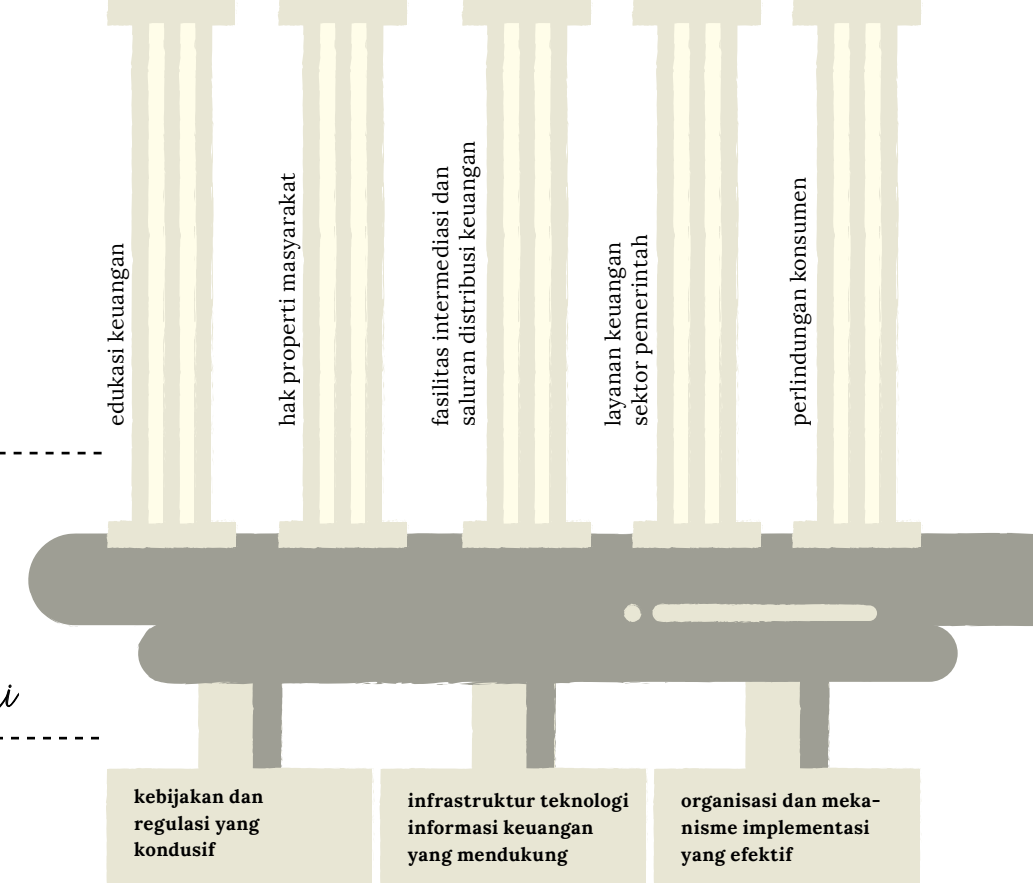
- masyarakat berpendapatan rendah
- pelaku usaha mikro dan kecil
- masyarakat lintas kelompok
  - pekerja migran
  - wanita
  - kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
  - masyarakat daerah tertinggal
  - kelompok pelajar mahasiswa, dan pemuda

## Prinsip

kepemimpinan  
keragaman  
inovasi  
perlindungan  
pemberdayaan  
kerjasama  
pengetahuan  
proporsionalitas  
kerangka kerja

## Lima Pilar

## Fondasi



## Dimensi Indikator

- AKSES
- PENGUNAAN
- KUALITAS

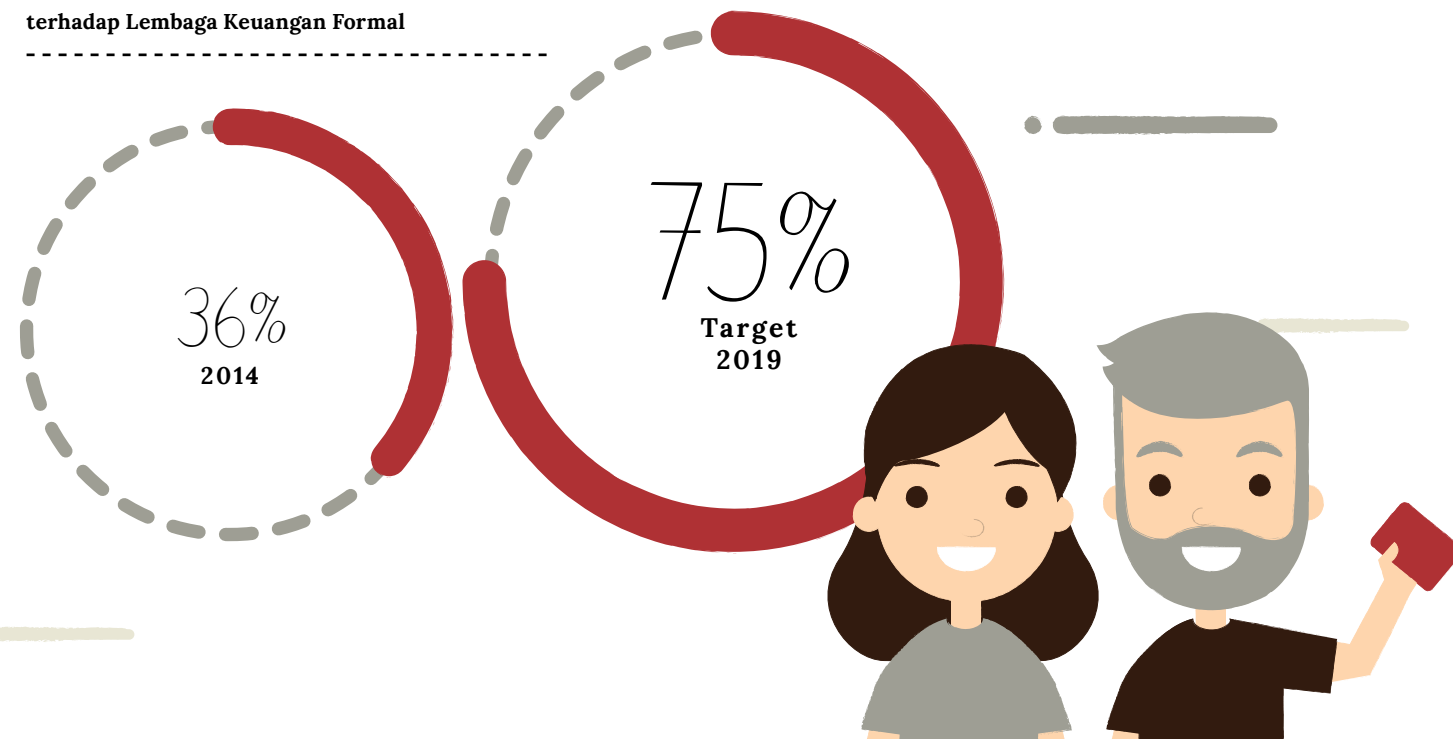
keterjangkauan fisik dan biaya

penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan

tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan

## Indeks

Penduduk Dewasa Indonesia yang Memiliki Akses terhadap Lembaga Keuangan Formal





# Akses Merata Rakyat Sejahtera

Perekonomian inklusif tercipta manakala seluruh lapisan masyarakat menikmati kesempatan yang sama untuk mengakses semua potensi ekonomi sehingga tiada lagi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Memiliki bonus demografi dan sumber daya alam melimpah otomatis membuat pemerataan hasil ekonomi mutlak diperlukan demi kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Untuk itulah, konsep perekonomian inklusif menjadi kunci bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak tetapi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ketidakmerataan potensi ekonomi antar wilayah yang ditunjukkan dari koefisien gini *ratio* yang terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk periode Maret 2016 gini *ratio* Indonesia berada di level 0,397. Meskipun angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 0,408 tetapi pemerintah tetap konsisten melakukan berbagai upaya agar ketimpangan semakin berkurang dan pembangunan semakin merata.

Pembangunan Terminal 3 Ultimate, Bandara Soeta, sebaga salah satu sarana mewujudkan konektivitas antarwilayah.

**Foto**  
Juan Herbert Girsang

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, pemerataan hasil pembangunan tersebut nantinya ditujukan bagi komponen individu dan antarwilayah. Pembangunan merata bagi komponen individu artinya pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan tinggi, tetapi juga bagi kalangan yang kurang beruntung. Sementara pembangunan merata antar wilayah dimaksudkan agar pembangunan tidak terfokus pada pulau Jawa saja melainkan di seluruh kepulauan di nusantara.

“Antarindividu bisa kita bandingkan, ikut semua atau tidak. Tidak hanya orang kaya (merasakan pembangunan), orang miskin juga bisa menikmati pembangunan, nanti yang miskin kita *kasih* perlindungan sosial. Sekarang dibangun lah. Harus terkoneksi, harus ada infrastruktur, dan energi. Seluruh upaya itu bisa membuat pembangunan inklusif,” terangnya.

Di samping itu, pemerataan pembangunan juga ditujukan pada seluruh komponen usaha baik sektor mikro, menengah, maupun besar. Suahasil juga mendorong agar seluruh komponen tersebut terlibat dalam mensukseskan pembangunan dengan memiliki akses yang sama di lembaga keuangan, infrastruktur, informasi, dan layanan pemerintah.

## APBN inklusif

Suahasil berpandangan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan besar untuk menciptakan perekonomian inklusif melalui

kebijakan APBN. Sebagai *nagara dana rakca* (penjaga keuangan negara), Kemenkeu berperan dalam menentukan kebijakan fiskal demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Merumuskan kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan negara bukan sekedar konteks penerimaan dan pengeluaran saja tetapi dalam konteks lebih luas. Ada konteks aset negara, kekayaan negara, serta menjaga kedaulatan negara. (Selain itu) Secara operasional, ada yang menjaga kas negara serta membuat perencanaan (kebijakan fiskal) untuk *medium* maupun *long term*,” tuturnya.

Suahasil menekankan bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibuat lebih efisien, realistis, dan kredibel. Upaya ini bertujuan untuk membuat APBN lebih inklusif, baik disisi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.

Disisi penerimaan, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan melakukan reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang berkeadilan serta memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Suahasil mengungkapkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai salah satu alat yang mencerminkan perekonomian inklusif disisi penerimaan, misalnya melalui penyesuaian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Bila seseorang memiliki pendapatan di bawah PTKP maka

ia tidak perlu membayar pajak. “Makin tinggi tingkat pendapatan seseorang, makin tinggi tarif pajaknya. Lebih kaya bayar lebih banyak, pajak progresif namanya,” ungkap Suahasil.

Sementara di sisi pengeluaran, pemerintah memperkuat pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi. Pembangunan nasional ditujukan untuk menjadi *trigger* percepatan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pembangunan yang merata maka akan dapat menambah lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.

Untuk tahun 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar Rp387,3 triliun. Kemudian terkait pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemerintah konsisten mengalokasikan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Untuk tahun 2017, total belanja pendidikan ditargetkan mencapai Rp416,1 triliun dan anggaran kesehatan sebesar Rp104 triliun.

Sebagai bagian dari perlindungan sosial, pemerintah melakukan perbaikan skema penyaluran subsidi dengan mengendalikan besaran alokasi dan menata ulang kebijakan subsidi energi dan nonenergi. Terkait subsidi energi, sejak tahun 2015, pemerintah mulai menghapus subsidi BBM karena dianggap tidak tepat sasaran. Penghapusan subsidi BBM tersebut selanjutnya dialihkan

untuk menambah belanja prioritas pemerintah.

Terkait subsidi nonenergi, pemerintah berupaya mengalihkan subsidi berbasis harga barang menjadi subsidi berbasis Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pemerintah melanjutkan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan kepada sekitar 6 juta RTS. Pemerintah juga menyempurnakan mekanisme penyaluran subsidi pangan (rastra) menggunakan layanan sektor Keuangan (nontunai/*voucher*) secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga memperbaiki mutu layanan kesehatan dan kelanjutan program bantuan langsung masyarakat. Dengan perbaikan *database* yang lebih valid dan akuntabel, pemerintah akan menata ulang sistem penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan pelayanan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

#### Keuangan inklusif

Salah satu komponen mewujudkan perekonomian inklusif ialah kemudahan akses pada lembaga keuangan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan indeks keuangan inklusif sebagai upaya untuk mencapai perekonomian inklusif di tanah air, Jum'at (18/1) lalu. Presiden menargetkan pada tahun 2019 indeks keuangan inklusif dapat mencapai 75 persen dari sebelumnya 36 persen di tahun 2014.

Menurut Sekretaris Menteri Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, untuk mencapai target ambisius tersebut, setidaknya ada lima pilar yang digunakan pemerintah. Pertama, edukasi keuangan dengan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat pada lembaga Keuangan serta mendorong lembaga Keuangan untuk membuka layanan hingga pelosok nusantara.

Kedua, hak properti masyarakat terutama terkait sertifikasi tanah. “Banyak masyarakat punya tanah tapi tidak bersertifikat (padahal), kalau punya maka *value* nya akan naik. Begitu nilai aset naik, bisa menjadi modal untuk dijadikan jaminan perbankan sehingga perbankan tertarik memberi kredit pinjaman. Kemudian masyarakat mendapat pinjaman dan dapat

meningkatkan bisnisnya,” ujar Lukita.

Ketiga, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan yang akan lebih banyak dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, layanan keuangan pada sektor pemerintah, salah satunya terkait bantuan sosial yang akan dikembangkan melalui gerakan nontunai. Pilar terakhir terkait perlindungan konsumen yang akan dilaksanakan melalui kerja sama OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah.

Selain pilar-pilar tersebut, kata Lukita, terdapat pondasi lain seperti regulasi yang harmonis, pembangunan infrastruktur, dan harmonisasi antar organisasi. “Kita tahu, akses pada telekomunikasi sangat penting untuk masyarakat di pelosok (sehingga) bisa memanfaatkan layanan lembaga keuangan. Satu lagi, bagaimana strategi keuangan inklusif bisa dilaksanakan dengan efektif karena meliputi berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L),” katanya.

Lukita menjelaskan bahwa pihaknya selaku koordinator SNKI berperan untuk mendorong munculnya inovasi yang dapat mendukung terlaksananya strategi tersebut dengan baik. Kementerian Koordinator Perekonomian berperan mendorong kepemilikan sertifikasi lahan, mengkoordinasikan kredit usaha rakyat (KUR), inisiatif peningkatan *professional trainee* dan edukasi mengenai keuangan inklusif, serta mengembangkan *platform e-commerce*.

Lukita menekankan hal

terpenting lainnya yakni implementasi dan koordinasi. “Di berbagai inisiatif tadi sebagai koordinator tentu ada tim pelaksana yang memastikan target-target tadi tercapai, didedikasikan penuh untuk memonitor, mengevaluasi pelaksanaan inisiatif tadi secara berkala. Tantangan terberatnya ialah membangun sinergi dan mensinkronkan langkah. Sebetulnya K/L punya program-program itu tapi kalau jalan sendiri-sendiri menjadi tidak pas,” jelasnya.

Kepala Ekonom Bank BRI, Anggito Abimanyu optimis bahwa pelaksanaan SNKI akan berjalan sesuai yang diharapkan. Hanya saja, lanjut Anggito, pemerintah harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi informasi serta membangun infrastrukturnya.

“Sekarang transaksi Keuangan, pasar modal, tidak perlu fisiknya. Bertransaksi keuangan cukup punya EDC *merchant* , tidak perlu buka cabang, tidak perlu ada kantornya, *branchless banking*. Sebetulnya teknologinya sangat memungkinkan untuk meningkatkan *financial inclusion*,” ujar Anggito.

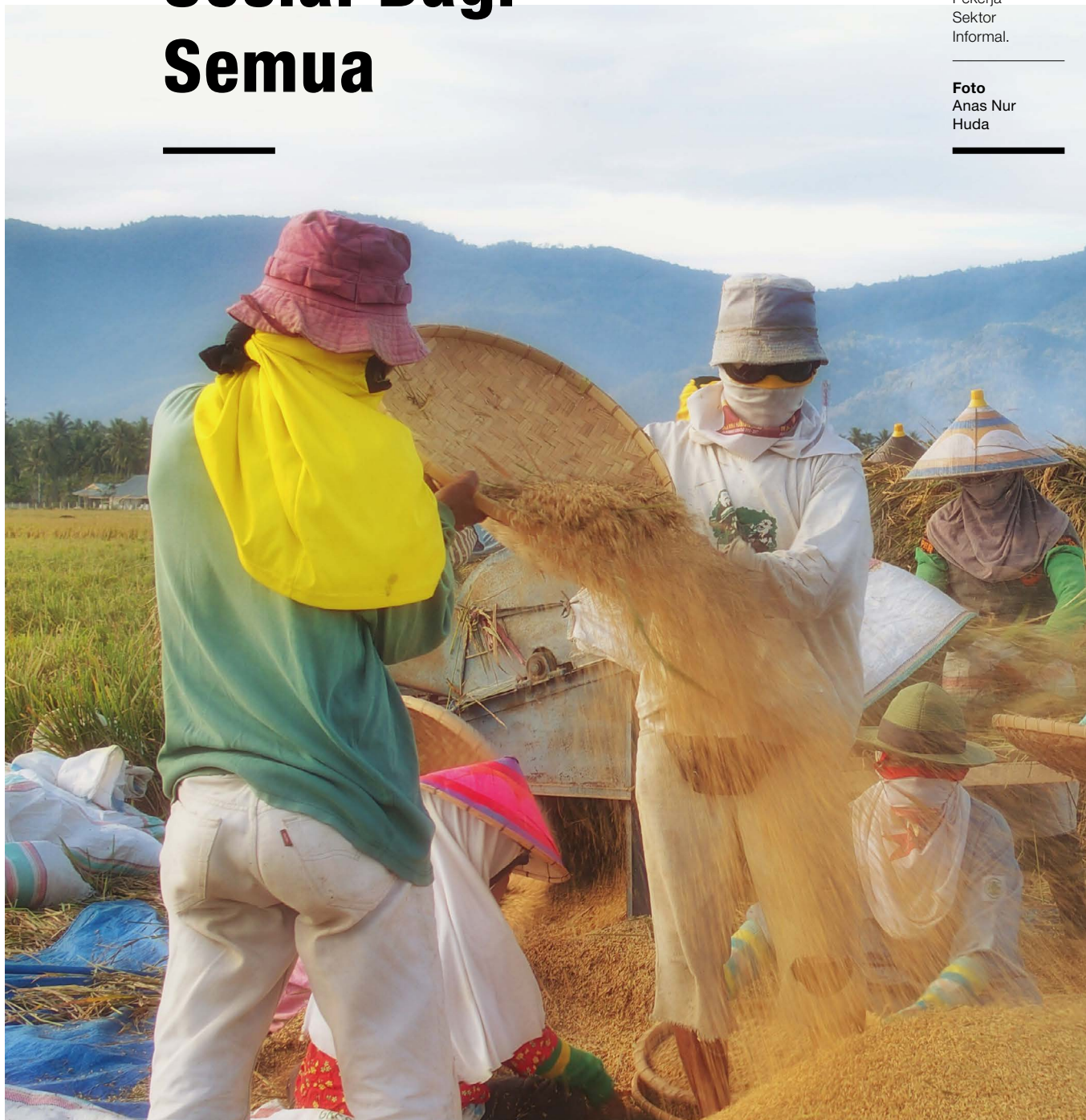
Di mata Anggito, Kemenkeu sebagai pengelola dana APBN harus memastikan penggunaan anggaran sesuai alokasinya sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Di sektor Keuangan, Anggito berharap Kemenkeu mampu mendorong pertumbuhan perbankan di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan melalui sosialisasi, teknologi, dan literasi (edukasi).

Teks lin Kurniati

# Perlindungan Sosial Bagi Semua

Pekerja Sektor Informal.

Foto Anas Nur Huda



Strategi pengentasan kemiskinan berkaitan erat dengan perlindungan sosial yang inklusif. Semua Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko sosial ekonomi. Misalnya risiko yang timbul karena kondisi kesehatan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, hingga yang sifatnya tak terduga seperti ancaman alam. Untuk itu, dari tahun ke tahun pemerintah merancang kebijakan yang sedemikian rupa agar perlindungan sosial tersebut terlaksana dengan efektif.

Menurut Suahasil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, di luar kebijakan subsidi idealnya ada satu paket perlindungan sosial yang tersedia. Keseluruhan paket ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ada lima jenis jaminan sosial yakni kesehatan, dana pensiun, dana kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. “Semua jaminan tersebut bertujuan untuk menutup risiko. Bukan hanya sakit dan kecelakaan kerja yang memiliki risiko. Usia tua, masa pensiun, dan kematian yang tidak terhindarkan pun bisa berisiko jika tidak di-*manage* dengan baik,” katanya.

Dipaparkan Suahasil lebih lanjut, pemerintah bukan hanya menyiapkan pembayarannya tetapi juga sistemnya. Dengan begitu semua orang, baik yang berada dalam sistem formal maupun informal, berkesempatan untuk mengelola risikonya sendiri. Cara pelaksanaanya diselenggarakan oleh beberapa badan. “Contohnya, untuk risiko kesehatan, perlindungan dilakukan dengan prinsip asuransi sosial yang dilakukan oleh BPJS. Bagi masyarakat yang tidak mampu, premi asuransi akan dibayarkan oleh negara,” jelasnya.

Suahasil juga menegaskan, konsep bantuan sosial memang hanya sekedar membantu. Umumnya, tingkat bantuan yang pas adalah 20 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Jumlah ini cukup untuk mengeluarkan seseorang dari keterpurukan tanpa menimbulkan ketergantungan. Sebagai ilustrasi, saat ini pemerintah tengah menjalankan Program Keluarga Harapan yakni pemberian bantuan tunai

kepada keluarga sangat miskin. “Meski bantuan ini kecil, tetapi yang penting dia bisa keluar dulu dari lubang kemiskinan. Kalau hamil bisa Periksa gratis, kalau mau sekolah juga ada biaya,” jelasnya.

Lebih jauh, bantuan sosial tidak dapat berdiri sendiri, harus disertai program pemberdayaan. Tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, begitu keluar dari lubang, penerima bantuan dapat kembali bekerja. Caranya sangat beragam, misalnya melalui berbagai pelatihan atau pinjaman modal untuk menjalankan usaha. “Ibaratnya kalau ada orang di dalam lubang, harus dibantu agar bisa keluar. Setelah keluar, baru dibantu lagi agar dia bisa bekerja.” kata Suahasil.

Ditanya tentang jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan miskin, Suahasil menjelaskan jaring pengaman dimaksudkan untuk menanggung sebagian risiko agar tidak terlampau besar atau untuk menanggung satu batas minimum tertentu. Ada beberapa instrumen yang sudah disiapkan pemerintah. Contohnya, seorang pekerja tidak boleh dibayar di bawah batas tertentu atau dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR). “UMR-nya itulah yang menjadi jaringnya. Kalau tidak ada aturan ini, pekerja bisa saja dieksploitasi dan dibayar serendah mungkin,” kata Suahasil.

Vivi Alatas, ekonom Bank Dunia menambahkan, perlu ada keseimbangan antara program

pencegahan dan pemulihan dalam kebijakan jaring pengaman sosial. Sebab itu, harus ada informasi akurat mengenai titik-titik rawan pada setiap sektor agar peristiwa yang tidak diinginkan dapat dimitigasi. “Misalnya untuk menjaga kesehatan anak, artinya *kan* harus cukup gizinya dan dijaga sanitasinya. Kaitannya bisa ke perubahan perilaku pola hidup sehat, menjaga kebersihan, menggunakan air bersih dan lain sebagainya. Mencegah kebakaran sama pentingnya dengan menyiapkan pemadam kebakaran,” ujar Vivi.

Di sisi lain, Anggito Abimanyu, ekonom Bank Rakyat Indonesia mengingatkan pemerintah untuk serius memperluas jaringan perbankan sambil mendidik masyarakat agar melek layanan keuangan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu pelaksanaan beragam program kesejahteraan. “Misalnya, dengan akses ke perbankan, siswa di pelosok bisa menerima bantuan dana pendidikan secara *real time, kan*,” katanya.

Suahasil mengakui saat ini pemerintah masih perlu banyak membenahi sistem perlindungan sosial, antara lain untuk pensiun dan hari tua. “Untuk PNS atau TNI dan Polri jaminan pensiun ini sudah tersedia, tetapi untuk sektor swasta masih belum semua. Bagaimanapun ini amanat Undang-Undang yang perlu segera kita tata lagi,” tutup Suahasil.

Teks Irma Kesuma



Foto  
Arfindo Briyan

# Ekonomi Inklusif Dorong Kesejahteraan Rakyat

Saat ini, Strategi Nasional Keuangan Inklusif sedang menjadi prioritas pemerintah. Sudah saatnya semua pilar keuangan Indonesia berkoordinasi demi terwujudnya perekonomian inklusif, yaitu perekonomian yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Simak wawancara Media Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang P. S. Brodjonegoro, mengenai perekonomian inklusif dan pendapat tentang perekonomian Indonesia tahun 2017.

**Menurut Anda, apa pengertian ekonomi inklusif?**

Saat menyusun alokasi anggaran, pemerintah harus fokus pada kewajiban. Kewajiban pemerintah

yaitu menyediakan infrastruktur dan memberi perhatian kepada kelompok masyarakat yang relatif kurang diuntungkan dengan kondisi saat ini. Maka, kita harus memastikan bahwa anggaran itu memang tepat sasaran kepada rumah tangga yang membutuhkan dan bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, serta mengurangi pengangguran dan ketimpangan.

Dengan adanya ekonomi inklusif, kita ingin pertumbuhan dan pembangunan bisa menyejahterakan masyarakat. *Nah* di situ *lah* tujuan anggaran kita. Inklusif itu artinya semua terlibat, semua merasakan dampaknya. Jadi, jangan sampai ada kelompok masyarakat yang terlupakan. Kalau kita hanya bicara pertumbuhan tanpa ada kata inklusif, maka akan ada kelompok masyarakat yang terlupakan atau dilupakan. Intinya, masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah.

#### Langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perekonomian inklusif?

Salah satunya kita akan melakukan perbaikan skema subsidi. Skema subsidi saat ini, terutama di masa lalu, sangat didominasi oleh subsidi harga barang. Subsidi harga barang itu memang bagus tapi kelemahannya tidak tepat sasaran. Subsidi yang tidak tepat sasaran bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Kita berharap, dengan uang yang terbatas, subsidi bisa diberikan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

*Nah* kita ingin merubah pola subsidi yang kurang tepat sasaran itu menjadi bantuan pemerintah

yang tepat sasaran. Jadi kita ingin mengarahkan sebanyak mungkin bantuan pemerintah itu langsung ke rumah tangga penerima. Tidak lagi memberikan bantuan kepada barangnya, seperti listrik, elpiji, atau beras. Tahun 2017, kita akan mulai uji coba di 44 kota/kabupaten untuk bantuan beras. Dulu namanya raskin (beras miskin), sekarang rastra (beras sejahtera). Jadi kita ingin penyaluran subsidi beras sejahtera ini tidak lagi dalam bentuk harga beras murah. Kita berikan bantuan dalam bentuk daya beli terhadap keluarga yang memang membutuhkan tambahan daya beli untuk mendapatkan beras.

#### Lalu, bagaimana penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) di lapangan saat ini?

Intinya, (tujuan) SNKI adalah untuk mendekatkan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dengan jasa layanan keuangan. Artinya sebanyak mungkin orang itu mempunyai rekening tabungan atau punya akses di perbankan. Namun kita harus paham perkembangan ekonomi saat ini, masyarakat tidak perlu lagi secara fisik harus dekat dengan bank. Dengan kemajuan teknologi, justru strategi keuangan inklusif harus mendorong adanya *branchless banking* (layanan perbankan tanpa melalui jaringan kantor) dan transaksi perbankan melalui telepon seluler. Masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa ke kantor pos dengan menunjukkan bukti transaksi di telepon seluler. Jadi saya melihat strategi keuangan inklusif ini merupakan cara terbaik untuk mendekatkan masyarakat kepada layanan keuangan.

#### Penyaluran subsidi yang tepat harus didukung dengan data yang akurat. Bagaimana dengan evaluasi database penerima subsidi?

Kita sudah punya daftar 40 persen rumah tangga dengan pendapatan rendah. Data tersebut mungkin bisa dijadikan target penerima bantuan, tapi data ini harus diverifikasi terus. Pertama, apakah dia masih ada atau sudah meninggal. Kedua, apakah dia masih miskin atau sudah tidak miskin lagi. Terkadang, ada orang yang hari ini miskin tapi tiba-tiba dia dapat warisan atau dapat hibah dari orang, lalu bisa jadi dia miskin lagi. Dinamika-dinamika seperti ini yang kadang susah terekam oleh pencatatan data. Perangkat desa harus melakukan verifikasi yang detail untuk memastikan apakah orang tersebut layak menerima bantuan. Jadi itu lah tantangannya, kalau kita mau (penyaluran subsidi menjadi) tepat sasaran maka harus punya data yang akurat.

#### Terkait outlook perekonomian Indonesia tahun 2017, dengan memandang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun sebelumnya, bagaimana Anda memandang perekonomian tahun depan?

Ekonomi tahun depan memang tidak banyak berbeda pada tahun 2016, dalam artian *outlook* perekonomian global masih belum cerah. Kemungkinan masih banyak tekanan dalam ekonomi global. Pertama, Amerika Serikat memiliki Presiden baru yang kita masih belum tahu bagaimana arah kebijakannya. Kedua, kemungkinan kenaikan tingkat bunga Amerika akan membuat modal kembali lagi ke Amerika, bukan lagi ke *emerging* ekonomi, yaitu ke Indonesia. Ketiga, harga komoditas sudah mulai membaik tapi tidak akan kembali ke harga tinggi seperti tahun 2011 atau 2012.

Poin paling penting dalam strategi ekonomi tahun 2017 yaitu pertumbuhan ekspor jangan samapi terlalu minus, harus terus diperbaiki. Berikutnya, pertumbuhan konsumsi harus dijaga di angka 5 persen atau lebih. Terakhir, pertumbuhan investasi harus didorong lebih tinggi menuju 10 persen.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, harapannya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 bisa mencapai sekitar 5 – 5,2 persen. Pertumbuhan itu sudah cukup baik untuk standar global. Ada beberapa negara yang memiliki perekonomian baik namun tidak didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula, misalnya negara-negara di Eropa dan Jepang.

Teks Pradany Hayyu

## Kemenkeu Sabet 3 Gelar di AMH 2016



Foto  
Dok. Biro KLI

Tahun ini, Anugerah Media Humas (AMH) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kembali digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara yang mengusung tema ‘Membangun Reputasi Indonesia Melalui Kerja Nyata Humas dan Komunitas Informasi’ ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja humas pemerintah sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja tersebut. Melalui ajang ini, diharapkan agar kohesivitas organisasi humas-humas pemerintah secara nasional menjadi semakin kuat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) Rudiantara dalam sambutannya mengatakan bahwa bidang Kehumasan berfungsi membentuk reputasi sebuah instansi, khususnya Pemerintahan. Menurutnya, humas pemerintah di semua instansi memiliki peran strategis sebagai penghubung Pemerintah dengan publik.

“Kita garis bawahi, reputasi Indonesia dan kerja nyata dari komunitas Kehumasan. Kalau kita lihat reputasi Indonesia, banyak yang sudah di-*deliver*, baik untuk masyarakat dalam negeri, maupun untuk mendatangkan investasi khususnya dari luar negeri,” kata Rudiantara.

Acara yang diikuti oleh peserta dari Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi serta Pemerintah Provinsi,

Kabupaten maupun Kota di Indonesia terdiri dari sejumlah kategori lomba. Kategori tersebut yaitu Penerbitan media internal (Inhouse Magazine); Laporan Tahunan Kinerja Humas (Annual Report); Pelayanan Informasi melalui internet (Website); Advertorial (cetak dan/ atau audio-video); Cinderamata Utama (Merchandise); Profil Lembaga Humas; dan *Stand* Pameran Instansi.

Dalam ajang yang berlangsung di Hotel Harris Citylink, Bandung pada Jumat, (18/11), Kementerian Keuangan meraih tiga penghargaan sekaligus. Pertama, Penghargaan Terbaik I diraih majalah Media Keuangan untuk kategori Penerbitan Media Internal. Kedua, Penghargaan Terbaik I diraih Laporan Tahunan Kehumasan Kementerian Keuangan untuk kategori Laporan Tahunan Kinerja Humas. Ketiga, Penghargaan Terbaik II diraih stand Kementerian Keuangan untuk kategori Pameran Instansi.

Teks Rezha S Amran

# Pemerintah Luncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif

**P**residen Joko Widodo secara resmi meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Peluncuran dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11).

Pemerintah menyusun strategi tersebut melalui koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat enam pilar dalam SNKI, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen. “Tugas juga sudah dibagi antarkementerian, antarinstansi pemerintah, untuk setiap pilar, tapi saya minta tetap semua bersinergi dalam pelaksanaannya,” tegas

Presiden.

Seperti diketahui, peningkatan keuangan inklusif Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meskipun menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, data tahun 2014 menunjukkan bahwa indeks keuangan inklusif Indonesia masih berada di angka 36 persen. Pemerintah menargetkan, pada tahun 2019, indeks keuangan inklusif Indonesia berada pada angka 75 persen.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem keuangan nasional. “Meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan kita melawan kemiskinan, melawan kesenjangan sosial. Ketika makin banyak rakyat dapat mengakses layanan perbankan, hidup mereka akan lebih

teratur karena pengaturan keuangan pribadinya lebih baik,” jelas Presiden. Pada kesempatan tersebut, ia juga menginstruksikan peningkatan akses sistem keuangan bagi para pelaku usaha kecil seperti petani; nelayan; buruh; serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Turut hadir dalam acara peluncuran tersebut, Gubernur BI Agus Martowardojo; Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution; Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa; Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf; dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

**Teks** Novita Asri H.



Foto  
Dok. Biro KLI

# Kesehatan Ibu Kekuatan Bangsa



Foto  
Arfindo Briyan

**H**ari Ibu sejatinya mengingatkan kita akan pemberdayaan perempuan. Agar berdaya perempuan harus lebih dulu sehat dan cerdas. Di sinilah kebidanan, salah satu profesi tertua di dunia, setia mendampingi kaum ibu agar mampu menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang terdekatnya. Emi Nurjasmi, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menceritakan pengabdian bidan bagi kesejahteraan keluarga Indonesia.

**Seperti apa akses layanan kesehatan ibu dan anak saat ini?**

Dari tahun 60-an kita sudah punya Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Hanya saja ketika itu di satu kecamatan baru ada satu BKIA dan di satu BKIA hanya ada satu bidan. Seringkali BKIA ini tidak terjangkau karena jarak satu desa dengan desa lainnya cukup jauh. Selain itu, kondisi geografis Indonesia cukup menantang dengan transportasi yang terbatas. Lokasi bidan kerap jauh dari pemukiman. Sekarang ini kondisi sudah semakin baik. Setidaknya setiap desa sudah memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) meski belum semuanya memiliki bidan.

**Bagaimana peran bidan di suatu negara?**

Masyarakat biasanya melihat bidan memeriksa kehamilan, menolong persalinan, melayani Keluarga Berencana (KB), menimbang bayi, dan memberi imunisasi. Namun di samping itu, bidan juga memberi pendidikan untuk memberdayakan perempuan. Pelayanan bidan harus menyeluruh, tidak hanya membicarakan kesehatan tetapi juga faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan. Sebab itu, seorang bidan perlu menggali kebiasaan-kebiasan pasiennya agar bisa memberi informasi yang benar, misalnya seputar perilaku hidup bersih dan pola makan sehat. Dengan begitu, paling tidak sang ibu bisa memelihara diri sendiri dan keluarganya. Kalau satu keluarga sehat, satu komunitas juga sehat. Kalau satu komunitas sudah sehat, maka satu negara juga akan sehat.

**Sejauh mana peran bidan dalam menjaga kesejahteraan kaum ibu?**

Sebenarnya, kehamilan dan persalinan itu adalah proses alami. Artinya *gak diapa-apain* juga anaknya lahir *kok*. Tetapi lebih jauh, kami harus menjaga agar kehamilan ibu sehat, persalinannya bersih dan aman

sehingga anaknya lahir dengan selamat dan berkualitas. Apalagi seribu hari kehidupan pertama menentukan cetak biru seorang manusia. *Nah*, semua ini dimulai dari masa kehamilan. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) tahun 2013, sebanyak 87 persen ibu hamil Indonesia memeriksakan diri ke bidan. Begitu pula dengan layanan KB, sebanyak 76,6 persen dilakukan oleh bidan.

Selain itu, bidan meyakini bahwa jika perempuan berdaya untuk mengambil keputusan sendiri, maka tugas bidan akan berkurang. Kalau perempuan memutuskan mau ikut KB dan memilih jenis kontrasepsi yang aman, artinya kemungkinan hamil lebih kecil dan risiko kematian ibu dapat ditekan. Namun masih sering kita lihat perempuan yang keputusan reproduksinya diatur oleh suami. Apa-apa harus tanya suami padahal yang menanggung risiko *kan* dia. KB bukan melarang orang punya anak tetapi mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak. Dengan begitu, anak bisa dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

**Bagaimana pandangan Anda terhadap mitos seputar kesehatan ibu dan anak?**

Indonesia ini multi budaya, sangat pluralis. Kita tidak bisa meremehkan adat setempat. Bidan harus bisa menilai, tradisi mana yang mendukung kesehatan ibu dan anak atau sebaliknya justru merugikan. Contoh kasusnya banyak. Misalnya mitos bahwa ibu hamil sebaiknya tidak makan ikan, padahal ikan baik sekali untuk memenuhi kecukupan gizi. Ada pula mitos bayi tidak boleh dibawa keluar rumah sebelum 40 hari, padahal dia harus diimunisasi dan diperiksa kesehatannya. Di pedalaman papua juga ada tradisi melahirkan di hutan karena tabu jika dilihat orang. Padahal hal ini sangat berisiko, sebab tidak ada pertolongan medis. Dalam konteks ini, bidan perlu memberi pengertian, bukan hanya kepada

ibu, tetapi juga masyarakat melalui tokoh adat setempat.

**Apakah norma budaya setempat menjadi kendala saat penyuluhan?**

Selain penolakan, bidan juga sering mengalami dilema. Di beberapa daerah bidan kerap diminta membantu melakukan sunat perempuan. Dari sisi kesehatan, sunat perempuan tidak ada manfaatnya. Selain itu, bidan tidak pernah diajarkan untuk melakukan sunat sehingga tidak ada kompetensi untuk itu. Sunat perempuan itu kan lebih ke persoalan sosial budaya. Di berbagai kelompok masyarakat seperti di Sulawesi bahkan dipestakan besar-besaran. Mengubah pola pikir masyarakat inilah yang butuh kerja keras.

**Apakah jumlah bidan Indonesia saat ini sudah cukup?**

Sebenarnya, rasio standar rekomendasi WHO adalah minimal 1 bidan untuk 1.000 penduduk. Polulasi di desa-desa tanah air saat ini bervariasi. Ada yang satu desa penduduknya mencapai 5.000 orang, ada pula yang hanya 400 orang. Saat ini, jumlah bidan sudah mencukupi, namun penyebarannya belum merata. Dari sekitar 85 ribu desa, 20 persen diantaranya belum memiliki bidan karena lokasinya yang terpencil. Sebagai contoh, dulu saat bertugas di Papua awal tahun 80-an, saya bahkan pernah harus berperahu selama delapan jam untuk menuju tempat kerja. Tidak ada transportasi darat apalagi udara. Kondisi terpencil atau terisolasi seperti ini masih banyak ditemui hingga sekarang.

**Bagaimana cara IBI meningkatkan kualitas bidan Indonesia?**

Tentu yang utama IBI mengupayakan pendidikan yang menghasilkan bidan yang kompeten. Mereka harus memiliki kemampuan yang komprehensif. Mulai dari melihat permasalahan secara holistik,

berpikir kritis, hingga kemampuan analisa yang tepat. Dari situ, IBI memberi advokasi kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menguatkan pendidikan bidan.

Saat ini, pendidikan bidan baru setingkat D3, rasanya masih perlu ditingkatkan. Kami berharap dapat menyiapkan bidan yang bukan hanya mampu mengerjakan tugas sesuai *Standart Operating Procedure* (SOP) tetapi juga sanggup menghadapi hal-hal di luar dugaan. Apalagi, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kerja bidan kontribusinya tidak kecil. Misalnya, bidan harus cepat merujuk pasien yang berisiko ke Rumah Sakit terdekat. Namun, kadang-kadang ibu tidak bisa menentukan sendiri sementara respon keluarganya lambat. Harus rapat keluarga dulu, menunggu semua kumpul. Akhirnya pertolongan yang diberikan terlambat.

**Apa pesan Anda bagi remaja putri agar kelak siap menjadi ibu?**

Saya harap remaja kita tidak menikah terlalu muda. Kalau kita lihat data Rikesda, sebanyak 4,8 persen atau sekitar 5 juta ibu Indonesia melahirkan pada usia di bawah 14 tahun setiap tahunnya. Padahal usia ideal untuk siap menjadi orang tua baik secara fisik maupun psikologis setidaknya 21 tahun. Menikah dan bersalin pada usia muda itu banyak risikonya, belum lagi kalau kita bicara bagaimana sang ibu kelak akan mendidik anaknya. Penyuluhan kesehatan reproduksi ini juga perlu diberikan ke tokoh-tokoh masyarakat karena seringkali orang tua yang meminta anaknya segera menikah.

**Kebijakan publik seperti apa yang diperlukan demi kesejahteraan ibu dan anak?**

Pertama, kaji ulang batas usia minimal



Emi Nurjasmi,  
Ketua Ikatan  
Bidan Indonesia

**Foto**  
Bagus Wijaya

untuk menikah pada UU Perkawinan. Naikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi setidaknya 18 tahun dari sebelumnya 16 tahun. Kesejahteraan ibu dan anak bukan hanya soal uang dan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Anak dan remaja juga perlu diberi informasi yang benar sehingga mereka tahu pentingnya menjaga perilaku seksual dan kesehatan reproduksi.

Kedua, perbaiki akses pendidikan agar ada kesetaraan kesempatan antara anak laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Dalam budaya

kita yang patriaki, kalau dana keluarga tersebut terbatas, sudah hampir pasti anak laki-laki dulu yang disekolahkan karena *toh* anak perempuan akan ikut suami.

Ketiga, giatkan kembali perencanaan pembangunan berbasis *gender*. Contohnya, saat ini masih sedikit sekali sektor formal yang menyediakan ruang laktasi. Di sektor informal malah tidak ada. Padahal sebagian besar perempuan justru bekerja di pabrik, pasar, di perkebunan dan sektor informal lain yang tidak ada fasilitas untuk membantu ibu memberikan ASI eksklusif.

**Teks** Irma Kesuma

# Kanwil Segudang Prestasi

Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat



Gedung asitektur kolonial itu menjadi saksi bisu berlangsungnya rangkaian acara Konferensi Asia Afrika tahun 1955 silam. Kini, bangunan yang dikenal dengan Gedung Dwi Warna itu telah resmi menjelma menjadi Museum Perbendaharaan. Di gedung itu pula berdiri Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Jawa Barat yang terpilih sebagai Kantor Wilayah Terbaik Pertama Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejarah Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat tak bisa lepas dari keberadaan Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Bandung. Pada 17 April 1975, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. KEP-407/MK/1/4/1975 mengenai pembentukan 11 Kanwil DJA, salah satunya Kanwil V DJA Bandung. Pada tahun 2001 terjadi reorganisasi di DJA sehingga Kanwil V DJA Bandung bertransformasi menjadi Kanwil XII DJA Bandung. Kemudian, sesuai dengan KMK No. 303/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 berubah menjadi Kanwil XII DJPB Bandung, dan sejak tahun 2008 berubah menjadi Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat.

Kini, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat terus menata organisasinya demi mewujudkan misi Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Regional. Berada di bawah arahan dan pimpinan Yuniar Yanuar Rasyid, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat terus melakukan terobosan berbagai inovasi hingga akhirnya sukses meraih predikat Kanwil Terbaik Pertama Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Keuangan.

## Inovasi tiada henti

Dalam buku profil Inovasi Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat,

total ada 10 inovasi yang telah dilakukan. Delapan diantaranya berupa aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan kinerja para pegawai. “Teknologi informasi melalui aplikasi merupakan komitmen Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yuni, sapaan akrab Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat yang menjabat sejak 20 Mei 2016 ini.

Delapan inovasi berupa aplikasi tersebut antara lain: Aplikasi Pengarsipan Kanwil, ASSIK (Aplikasi Sistem Informasi untuk Satuan Kerja), Aplikasi Perpustakaan, SI JAKA MANTRA (Aplikasi Sistem Jaringan Komunikasi Antar Mitra), Aplikasi Mesin Antrian dengan KIPS (Kartu Identitas Petugas Satker), Aplikasi Sistem Tool Persuratan, dan SMART (Sistem Monitoring Aktivitas Satker Terpadu). Sedangkan inovasi non-aplikasi yaitu Penertiban Rumah Dinas dan Gita Senja Dwi Warna (kegiatan yang menampilkan kreasi seni seluruh pegawai).

Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat patut berbangga bisa memiliki cakupan wilayah kerja yang luas dan potensial. Pesatnya pembangunan di Provinsi Jawa Barat tak lepas dari peran Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat yang membawahi 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Seluruh KPPN tersebut tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, antara lain KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, KPPN Sumedang, KPPN Garut, KPPN Tasikmalaya, KPPN Purwakarta, KPPN Karawang, KPPN Bekasi, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi, KPPN Kuningan, dan KPPN Cirebon.

## Langganan juara

Prestasi sebagai Kanwil Terbaik Pertama Tahun 2016 bukanlah yang pertama kali diraih kantor yang berlokasi di



Menerma penghargaan Kanwil Terbaik Pertama, pada saat Upacara Peringatan Hari Oeang tahun 2016.

Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat

Foto Dok. Kantor

Jalan Diponegoro No. 59 Kota Bandung ini. KPPN yang berada di bawah Kanwil Provinsi Jawa Barat seakan berlomba-lomba unjuk prestasi. Salah satu penghargaan yang membanggakan yaitu KPPN Kuningan sebagai Juara KPPc (Kantor Pelayanan Percontohan) Terbaik Tahun 2015 dan KPPN Purwakarta sebagai Peringkat II KPPc Tahun 2015.

Selain itu, KPPN Bandung I juga sukses meraih Sertifikat ISO oleh British Standard Institution (BSI Group Indonesia). Di kalangan internal, pada Januari 2016 Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai Unit Eselon II Paling Responsif dalam menindaklanjuti Hasil Rapat Pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dan DJPB berdasarkan Monitoring Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* (DAMS).

Kesuksesan kanwil yang mengusung motto “Kepuasan Anda Tujuan Kami” ini tentu tak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Hingga

Mei 2016, tercatat jumlah pegawai Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat sebanyak 125 orang. Seluruh pegawai terbagi dalam lima unit Eselon III, yaitu Bagian Umum, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Prestasi tentu tak selalu dibuktikan melalui ajang penghargaan. Target yang terlampaui juga merupakan suatu pencapaian kerja. Selain banyak penghargaan yang telah diraih, selama tahun 2015 Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dinilai sukses melakukan upaya penertiban rumah dinas, upaya pencegahan kebakaran, dan pembangunan museum. Direktur Jenderal Perbendaharaan turut mengapresiasi capaian Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat sebagai Kanwil dengan *progress* penertiban Barang Milik Negara berupa rumah dinas tertinggi.

## Museum Perbendaharaan

Gedung Dwi Warna merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung. Dalam rangka memelihara aset bersejarah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, maka Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat berinovasi dengan mendirikan Museum Perbendaharaan. Museum yang berlokasi di satu gedung dengan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat ini telah diresmikan oleh Menteri Keuangan pada bulan Maret 2016 lalu.

Museum Perbendaharaan dilengkapi dengan sarana penunjang interaktif berbasis internet, seperti *display* layar sentuh sebaran kantor vertikal DJPB dan tayangan video yang dapat diakses pengunjung secara langsung. Museum yang berada di samping Museum Geologi Bandung ini diharapkan bisa menjadi media edukasi bagi masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.

Teks Pradany Hayyu



Putut Hari Satyaka

# Lakoni Saja

Hidup itu mengalir saja tetapi harus tetap punya cita-cita, punya keinginan untuk mencapai sesuatu. Lakoni saja, tidak usah terlalu ingin meloncat kesana kemari.

Sejumlah remaja Karang Taruna di sebuah wilayah Surakarta itu tampak serius bermain peran dalam suatu simulasi (*role play*). Terlihat seorang remaja laki-laki berperan menjadi pemuda miskin yang mencuri ayam demi memenuhi kebutuhan pangannya. Sementara remaja yang lain berperan sebagai ketua RW, tokoh agama, satpol PP, dan masyarakat umum.

Dalam permainan yang dikenal dengan simulasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tersebut, mereka berupaya menyelesaikan permasalahan melalui diskusi dan berpendapat, tanpa konflik. Inilah kehidupan remaja Putut Hari Satyaka, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang membentuk pribadinya menjadi sosok pemimpin muda.

Mengalir

Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 4 Surakarta, Putut - panggilan akrabnya, berniat mendalami ilmu tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan. “Sekitar tahun 1991, ada film Indiana Jones. Kemudian saya ingin jadi arkeolog karena habis nonton film itu sepertinya menarik,” ujarnya.

Namun, keinginan itu harus dikubur jauh karena sang ayah tidak menyetujui. Beruntung, Putut diterima di Universitas Sebelas Maret melalui jalur Penelusuran Minat dan Keterampilan (PMDK). Tanpa ujian masuk, pria kelahiran 9 Juli 43 tahun lalu inidengan mudah meneruskan pendidikan ekonomi pembangunan di kampus yang berdiri pada 1976 silam.

Pada masa itu, bila mahasiswa luar kota Surakarta sibuk dengan kegiatan dalam kampus, Putut justru lebih sibuk dengan kegiatan luar kampus. Sejak lulus SMA, anak pasangan Haryono dan Sri Suharini ini dipercaya menjadi Ketua Karang Taruna di lingkungan tempat

tinggalnya.

“Disitu saya belajar berorganisasi, bagaimana me-*manage* orang, menghargai pendapat, membuat dia mau bekerja tanpa paksaan. Kita juga belajar bagaimana mengatur *schedule*, program, meski di level yang paling kecil. Prestasinya lumayan, misalnya membuat perpustakaan atau taman bacaan di kampung, juara voli se-kecamatan, hingga juara *group* Keroncong se-kota Surakarta,” tutur Putut.

Setelah lulus Sarjana tahun 1996, Putut menghadapi situasi yang rumit dalam hidupnya. Kala itu terjadi krisis ekonomi yang menerpa hampir di seluruh wilayah Asia Timur, tak terkecuali Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan terpaksa merumahkan para pekerjanya. “Di tengah (situasi) banyak orang diputus hubungan kerja, sebaliknya pada waktu itu saya sedang mencari kerja.”

Pantang menyerah, bungsu dari lima bersaudara ini berangkat ke ibukota. Dengan gigih, ia mencoba peruntungan dengan melamar kerja ke Jakarta. Beruntung, Kementerian Keuangan kali pertama membuka penerimaan calon PNS terbesar dengan kuota seribu orang. Setelah melalui beberapa kali ujian, dari total jumlah pelamar mencapai 26 ribu orang, Putut akhirnya diterima di Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM).

Putut yang ditempatkan di Biro Analisa Keuangan Daerah ikut terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Perimbangan Keuangan. “Meskipun saya cuma operator laptop dan proyektor, saya mendengar apa yang didiskusikan oleh DPR dan Menteri sehingga menambah *knowledge*. Akhirnya pada 1999, aturan tersebut disahkan. Kemudian akhir tahun 2000, BAKM dibubarkan, diangkat levelnya menjadi Eselon I,” katanya.

Sejak itulah, Putut ditempatkan di subdirektorat Evaluasi Pembiayaan

Desentralisasi, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berkah, Putut yang baru empat tahun bekerja diangkat menjadi Kepala Seksi Evaluasi Pembiayaan Desentralisasi II. Lalu pada 2003, Putut dipercaya sebagai Kepala Seksi Informasi Keuangan Daerah II dan setahun kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi Keuangan Daerah II.

Dibesarkan oleh kedua orangtua yang berprofesi sebagai guru, membuat hasrat Putut untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri tak pernah surut sejak diterima di Kementerian Keuangan. Namun demikian, tawaran pertama justru datang dari dalam negeri.

“Ada cerita unik, saya sudah lulus beasiswa di dalam negeri. Waktu saya izin mau sekolah, saya dimarahi habis-habisan oleh direktur, kata beliau ‘kalau saya jadi kamu tidak akan saya ambil (beasiswa itu).’ Akhirnya saya memutuskan menolak beasiswa tersebut,” ceritanya.

Meski awalnya tak sedikit yang mengiraia menyia-nyiakan kesempatan, lanjut Putut, keputusannya tersebut ternyata berbuah manis. Tak lama berselang, ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri tahun 2006. Putut menempuh pendidikan *Master of Public Policy* di Australian National University.

Selang seminggu kembalinya ke tanah air, Putut mendapat rezeki menjabat Kepala Seksi Wilayah I, Subdirektorat Dana Desentralisasi, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah. Baru beberapa bulan menjabat, Putut ditempatkan sebagai Kepala Seksi Evaluasi Perekonomian Daerah di Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah.

Selanjutnya, pada 2009 Putut diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Evaluasi Dana Desentralisasi dan

Perekonomian Daerah lalu menjadi Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus pada 2014. Kemudian mulai tahun 2015, Putut dipercaya sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Saya mungkin direktur yang diangkat terakhir kali tanpa proses *bidding*, *based on* kepercayaan plus prestasi dan pengamatan dari pimpinan.”

Saat menjadi Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Putut mengakui merasakan tantangan berat. Bila sebelumnya Putut menghabiskan waktunya untuk mengelola dan transfer ke daerah, dana perimbangan hingga pinjaman tetapi kali ini ia harus membuat peraturan perpajakan daerah hingga mengevaluasinya.

“Saya harus menguasai telaah hukumnya, padahal saya Sarjana Ekonomi. Meski bukan berarti Direktur PDRD harus sarjana hukum tapi kajian evaluasinya harus terkait masalah peraturan perundang-undangan. Saya baru mengerti produk hukum (dapat) berimbas pada produk hukum yang lain. Satu kesempatan belajar buat saya, berat tapi menarik, sangat *challenging*,” terang pria yang gemar menonton film bergenre spionase dan kolosal ini.

Enam bulan kemudian, Putut diamanahkan menjadi Sekretaris DJPK. Hal pertama yang ia lakukan ialah membenahi manajemen sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Walaupun hingga saat ini dari sisi kuantitas belum terpenuhi, Putut berupaya meningkatkan kualitas pegawai dengan merumuskan pemetaan pegawai serta mendorong jabatan fungsional (jafung).

“*Nature* pekerjaan Ditjen Perimbangan Keuangan lebih banyak yang bersifat fungsional seperti melakukan perencanaan anggaran, transfer, evaluasi, menyusun kebijakan. Saya ingin lebih banyak bergerak ke arah fungsional supaya karier tidak terbentur pada struktural saja. Nanti namanya jabatan



Foto  
Adhi  
Kurniawan

fungsional analisis Keuangan pusat dan daerah. Kemudian, kita akan menjadi Pembina jafung untuk seluruh daerah,” ujarnya.

Filosofi hidup

Ayah yang berprofesi sebagai guru bahasa Jawa Sansakerta merupakan sosok paling berpengaruh dalam hidup suami dari Sri Wartini ini. Saat dirinya resmi menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sang ayah memberikan pesan khusus yang selalu diingat dan dijadikan filosofi dalam dirinya. Pertama, sebagai PNS harus memiliki NIP yakni ‘*Nrimo Ing Pandum*’ yang berarti ikhlas atas apa yang diterima dalam hidup.

“Lakoni saja apa yang sudah menjadi garismu, tak usah terlalu berambisi. Orang harus punya cita-cita tapi dalam mencapainya tidak boleh menyikut orang lain. *Do your best* menurutmu, untuk dirimu, untuk pekerjaanmu tapi tidak boleh mengganggu orang lain. Terima hasil rezekimu, tidak usah cari yang macem-macem,” jelas ayahnya.

Kedua, ‘*goleko jeneng ojo golek jenangmengk**o wis yen entuk jeneng bakalan entuk jenang.*’ Pepatah jawa tersebut berarti carilah nama baik bukan mencari harta, nanti bila sudah mendapatkan nama baik maka rezeki akan mengikuti.

Dengan memegang teguh filosofi

tersebut, penggemar buku sejarah dan filosofi ini merasa perjalanan kariernya berjalan mulus. “Karier saya terus terang banyak peruntungan-peruntungannya sehingga meniti kariernya seperti ada loncatan. Itu harus saya syukuri kepada Allah swt, ternyata keberuntungan itu memang diberikan Allah kepada saya,” katanya.

Ke depan, dalam kariernya, Putut berharap DJPK menjadi organisasi yang solid, memiliki semangat korps yang membuat para pegawainya bangga sebagai pengelola keuangan negara. Menurutnya, bila pegawai merasa nyaman dalam bekerja, dalam arti merasa dihargai, dilindungi, serta terpenuhi kebutuhan, maka mereka dapat memberikan usaha yang terbaik dan membawa DJPK menjadi lebih maju.

Sementara dalam kehidupan pribadinya, Putut bermimpi memiliki sebuah taman bacaan yang bermanfaat untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Selain itu, ayah dari Dayinta Rahma Fahila dan Denaya Riska Fauziah ini juga ingin *travelling* keliling dunia, “Saya ingin suatu waktu *travelling* ke tempat yang ada unsur *culture*-nya. Misalnya tempat bersejarah di Eropa atau bekas peninggalan Majapahit di Indonesia,” ungkapnya.

Teks lin Kurniati

# Tetap Waspada

Pada triwulan III-2016, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, tetapi tergolong lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang lain.

Dalam konferensi pers terkait perkembangan ekonomi terkini yang berlangsung Kamis (10/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulani Indrawati menilai kinerja pertumbuhan ekonomi domestik cukup menggembirakan. “Angka pertumbuhan pada kuartal III yang mencapai 5,02 persen lebih tinggi dibandingkan berbagai kinerja ekonomi di kawasan *emerging country* lainnya, jadi Indonesia masih cukup kuat,” kata Menkeu di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pemerintah akan menggenjot investasi dan konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan terakhir tahun ini. Hal ini, lanjut Menkeu, akan dilakukan sejalan dengan tren peningkatan belanja pada triwulan IV, baik belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada pengujung tahun ini, realisasi belanja pemerintah tahun ini diramalkan bisa mencapai 96 persen.

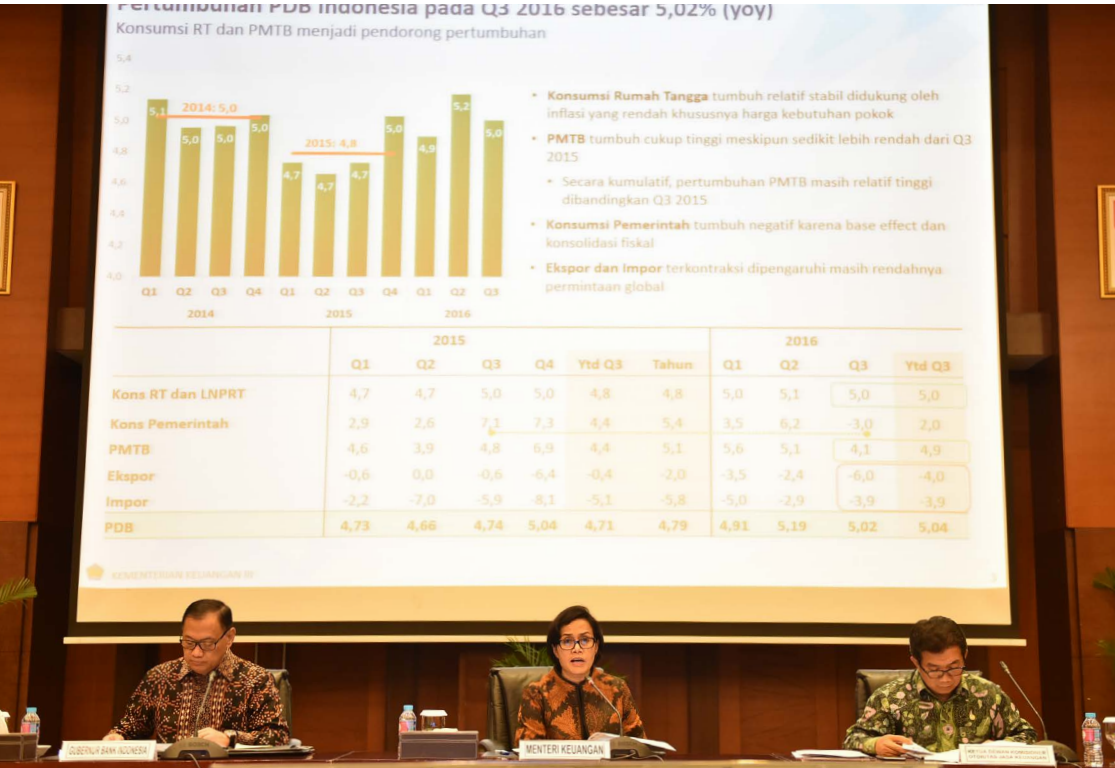
Saat bertemu dengan ratusan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Den Haag, Belanda, Minggu (13/11), Menkeu mengatakan bahwa Pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS) pasti memiliki pengaruh kepada kondisi ekonomi dunia. AS merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Oleh karena itu, sebagai negara ekonomi terbuka, lanjut Menkeu, Indonesia harus turut bersiap-siap dengan kebijakan AS. “Siapa pun yang dipilih oleh rakyat AS sebagai pemimpinnya, yang kemudian

diterjemahkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, tentu akan memiliki pengaruh di dunia. Karena dengan size ekonomi Amerika, tentu itu akan sangat mempengaruhi dari sisi ekonomi dan sisi geopolitik bahkan dari sisi percaturan keseluruhan dengan negara di dunia,” ujar Menkeu.

Untuk menghadapi keadaan yang masih tidak menentu, Indonesia sebagai negara yang juga relatif besar harus dapat menciptakan permintaan domestik. “Negara dengan ekonomi yang sehat mampu menjaga dari turbulensi krisis global dan di dalam (perekonomian dalam negeri) diperkuat . Oleh karena itulah, strategi ekonomi Indonesia yaitu bagaimana membuat permintaan domestik menjadi sehat dan kuat,” kata Menkeu.

### Harga komoditas dan neraca perdagangan

Berdasarkan rilis Bank Indonesia (BI) yang dikeluarkan pada Kamis (17/11), BI menyatakan bahwa pemulihan ekonomi global masih berlangsung lambat, meskipun harga komoditas sudah mulai membaik. Ketidakpastian perekonomian global yang meningkat setelah Pemilu Amerika Serikat (AS) berlangsung ternyata berjalan bersamaan dengan perbaikan perekonomian Negeri Paman Sam. Dalam kondisi tersebut, kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate (FFR) pada bulan Desember 2016 diprediksi semakin menguat. Yang perlu digarisbawahi, pertumbuhan ekonomi di negara maju lainnya, seperti Uni Eropa, cenderung masih terbatas



dan dibayangi oleh risiko politik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat dalam keterangan resmi yang sama.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti India dan Tiongkok diperkirakan masih menjadi pendorong ekonomi global. Di pasar komoditas, harga minyak dunia masih berada pada level yang rendah, sejalan dengan masih tingginya produksi minyak negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC).

BI mengungkapkan bahwa sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia terus mengalami perbaikan, seperti minyak kelapa sawit, batubara, dan beberapa barang tambang lainnya. “Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan dalam masa transisi pemerintahan AS serta kebijakan yang akan ditempuh di AS, terutama terkait dengan kebijakan fiskal, suku bunga dan perdagangan internasional,” kata Arbonas.

Sementara mengacu pada rilis yang dikeluarkan dua sebelumnya, BI memaparkan bahwa neraca perdagangan

Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Oktober sebesar 1,21miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan nonmigas menjadi faktor pendorong utama. Meskipun demikian, surplus pada Oktober sedikit lebih rendah dibandingkan surplus sebulan sebelumnya, yaitu sebesar 1,27 miliar dolar AS. Menurut Arbonas, surplus yang lebih rendah dipengaruhi oleh menurunnya surplus neraca perdagangan nonmigas, meskipun pada saat yang sama defisit neraca perdagangan migas juga menurun,” ujar Arbonas. Secara umum, BI menilai kinerja neraca perdagangan pada Oktober sebagai hasil positif dalam mendukung kinerja transaksi berjalan.

### Triwulan IV yang menentukan

Ditemui tim Media Keuangan di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pertengahan bulan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa triwulan IV akan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi dan tingkat penyerapan tahun

ini. “Realisasi pertumbuhan sebesar 5,1 persen pada tahun ini tergantung nanti triwulan IV-nya. Kalau triwulan IV bisa 5,2 persen, misalnya didorong oleh daya serap belanja yang optimal, barangkali pertumbuhan 5,1 pada 2016 masih dimungkinkan,” kata Bambang.

Mantan Menteri Keuangan tersebut meyakini tingkat penyerapan bisa sesuai target. “Tampaknya bisa terealisasi, karena sudah ada pemotongan juga. Saya melihat mungkin kita harus bicara dari kualitas penyerapan itu sendiri,” kata Bambang. Pemerintah menginginkan ke depan, penyerapan bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran, melainkan juga bisa mencerminkan perencanaan kualitas belanja berdasarkan prioritas. “Bukan apa-apa, mencari uang pajak (sebagai penerimaan) itu susah,” ujarnya lagi.

Dengan anggaran APBN yang terbatas, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas belanja dan melakukan penajaman prioritas.

Bambang menjelaskan bahwa dana yang dihimpun dari program amnesti pajak tahun ini sebaiknya digunakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan dalam konferensi pers terkait perkembangan ekonomi terkini pada Kamis (10/11) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Foto Dok. Biro KLI

## ” Komentor Pakar

untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur. “Kami harap apapun repatriasi nanti, ada yang masuk untuk membiayai proyek-proyek investasi. Menurut saya hal itu sangat strategis kalau bisa dilakukan,” ujarnya.

**Tahun depan lebih baik**

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di kesempatan yang berbeda, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Hera Susanti, belum lama ini berpandangan bahwa pertumbuhan 5,1 persen pada tahun 2016 merupakan pencapaian yang sulit dicapai. Di samping mempertimbangkan realisasi pertumbuhan pada triwulan I-III, Hera juga menyoroti pengeluaran pemerintah dan investasi yang tumbuh negatif. Namun, pada triwulan IV, pemerintah dipandang memiliki peluang dengan didorongnya pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat.

Berkaitan dengan penyerapan anggaran, kata Hera, pola setiap tahun memang penyerapan triwulan keempat selalu meningkat di akhir tahun. “Apalagi tahun lalu, penyerapan di triwulan keempattinggi sekali,” ujar Hera. Namun, dengan adanya perlambatan ekonomi di triwulan ketiga, Hera tidak terlalu optimis penyerapan anggaran dapat mencapai target.

Secara global, pemerintah dipandang perlu mewaspada dampak dari Brexit dan hasil pemilu di AS yang menyiratkan adanya kecenderungan perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini dipandang kurang nyaman dengan globalisasi ekonomi saat ini. Hal ini juga, dalam skala yang lebih kecil ditunjukkan oleh perkembangan di berbagai negara di Eropa, yang cenderung menginginkan kebijakan lebih protektif. “Sampai awal 2017, menurut saya orang masih menunggu bentuk kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh AS dan beberapa hasil pemilu di negara Eropa lainnya, sehingga agak sulit untuk diprediksi,” kata Hera. Walaupun fondasi perekonomian Indonesia dianggap sudah cukup solid, Hera menekankan perlunya sikap waspada dan membutuhkan *monitoring* yang ketat terhadap kondisi ekonomi global.

Di ujung wawancara, Hera mengatakan perekonomian Indonesia pada 2017 akan tetap stabil bahkan cenderung bisa lebih baik. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan yang diambil di tahun 2016. Hera menyebutkan reformasi fiskal dan berbagai paket kebijakan akan menunjukkan dampaknya pada tahun depan.



**Bambang Brodjonegoro**  
Menteri PPN/  
Kepala Bappenas

“Kemungkinan ekonomi global pada 2017 masih akan menghadapi banyak tekanan. AS mempunyai presiden baru yang kita belum tahu bagaimana arah kebijakannya. Di samping itu, kenaikan tingkat bunga di sana pasti membuat modal itu kembali lagi ke AS, bukan lagi ke *emerging country* seperti Indonesia. Ketiga, harga komoditas sudah mulai membaik, tapi tidak akan kembali ke harga tinggi seperti tahun 2011 dan 2012. Keempat, Tiongkok juga sedang mengalami moderasi dalam ekonominya.

Jadi kalau melihat faktor-faktor itu, sumber permintaan global kurang kuat. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan ekspor. Di samping itu, pemerintah juga perlu menjaga konsumsi masyarakat. Yang paling penting strategi 2017 adalah ekspor agar jangan terlalu minus pertumbuhannya, konsumsi harus dijaga, dan ketiga yang paling penting investasi harus didorong lebih tinggi.”



**Hera Susanti**  
Pengajar FEB UI

“Kalau kita lihat realisasi pertumbuhan ekonomi 2016 pada triwulan I-III berkisar antara 4,49 – 5,18 persen secara *year on year*(yoy), maka agar diperoleh pertumbuhan 5,1 persen dibutuhkan pertumbuhan 5,28 persen yoy di triwulan keempat. Dengan melihat perekonomian yang berjalan sekarang, dimana pengeluaran pemerintah dan investasi tumbuh negatif, rasanya sulit untuk mencapai pertumbuhan 5,1 persen di tahun 2016.

Walaupun jawaban dari semuanya kelihatan pesimis, saya tetap yakin perekonomian Indonesia pada 2017 akan tetap stabil dan bahkan cenderung bisa lebih baik. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan yang diambil di tahun 2016, misalnya reformasi fiskal dan peluncuran berbagai paket kebijakan yang dampaknya baru akan dirasakan di tahun 2017.”

Teks Dwinanda Ardhi



Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia

# Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

## Fasilitas dan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur di Indonesia

## Fasilitas Penyiapan Proyek PROJECT DEVELOPMENT FACILITY

Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJKP menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJKP dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*).

### Manfaat

Membantu PJKP menyusun kajian prastudi kelayakan dan dokumen lelang secara profesional sehingga mampu menarik minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek KPBU.

Mendampingi PJKP dalam transaksi proyek KPBU sampai mencapai *financial close*.

Menyelaraskan penyediaan fasilitas oleh Menteri Keuangan untuk Proyek KPBU dalam satu rangkaian proses yang efektif dan efisien.

### Jenis Fasilitas

- 1 Penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan dan kajian /dokumen pendukungnya
- 2 Pendampingan transaksi proyek KPBU

## Penjaminan Infrastruktur

### INFRASTRUCTURE GUARANTEE

Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJKP untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur – sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU – yang menjadi tanggung jawab PJKP. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai *single window policy*. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas modal PT PII, maka akan dilakukan penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII.

### Manfaat

Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan

Menjamin kinerja PJKP selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU

Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan

## Dukungan Kelayakan VIABILITY GAP FUND

Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.

### Manfaat

- 1 Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta.
- 2 Meningkatkan kelayakan finansial proyek KPBU sehingga menimbulkan minat dan partisipasi pihak swasta.
- 3 Meningkatkan kepastian pengadaan badan usaha pada proyek KPBU sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan.
- 4 Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

## Pembayaran Ketersediaan Layanan

### AVAILABILITY PAYMENT

Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

- 1 Jika dibandingkan dengan Pengadaan Konvensional, Skema AP memiliki beberapa keunggulan, antara lain:  
Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi proyek infrastruktur
- 2 Kepastian pengembalian investasi badan usaha
- 3 Badan usaha tidak menanggung risiko permintaan (*demand risk*)



# Insentif Fiskal untuk Pemanfaatan Gas Bumi

Teks Anda Nugroho dan Hidayat Amir\*)

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik. Namun, pemerintah masih terkendala oleh mahalnnya harga gas yang sampai ke tangan industri pengguna. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan insentif fiskal melalui Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi ketiga pada 7 Oktober 2015 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk merealisasikan harga gas domestik yang kompetitif.

Gas bumi mempunyai posisi yang unik dalam struktur produksi. Selain berfungsi sebagai bahan baku produksi, gas bumi bisa juga berfungsi sebagai sumber energi. Pemakaian gas bumi sebagai bahan

baku industri antara lain dapat ditemui di industri pupuk. Pada industri tersebut, lebih dari 70 persen biaya produksi merupakan biaya pembelian gas bumi. Sementara itu, pemakaian gas bumi sebagai energi dapat ditemui di hampir semua sektor, seperti: transportasi, manufaktur, dan pembangkit listrik. Gas merupakan komoditas yang paling ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil lainnya karena kandungan karbonnya paling rendah dan tidak menghasilkan zat residu, seperti: sulfur, merkuri, atau residu lain yang berbahaya bagi kesehatan. Kesadaran akan lingkungan membuat permintaan gas meningkat (Flavin & Kitasei, 2010).

Penggunaan gas bumi untuk kebutuhan domestik terus mengalami peningkatan. Awalnya mayoritas gas bumi ditujukan untuk tujuan ekspor, hanya porsi kecil dari gas bumi nasional yang dipakai untuk mensuplai kebutuhan

domestik. Pada tahun 2005, hanya 26 persen dari gas bumi yang dihasilkan dipakai untuk kebutuhan industri domestik, sisanya diespor ke luar negeri. Kenaikan harga minyak bumi membuat industri domestik mulai melirik komoditi gas bumi sebagai sumber energi alternatif. Dalam perkembangannya, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik terus mengalami peningkatan. Menurut proyeksi SKK Migas, pada tahun 2016 alokasi gas bumi untuk domestik mencapai 58 persen dari total produksi atau mencapai 3.971 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*).

Peluang optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk industri domestik masih terbuka lebar. Menurut *BP Statistical Review of World Energy* (2016), dari sisi produksi Indonesia berada pada peringkat ke-11 produsen gas bumi terbesar di dunia. Namun, jika dilihat dari sisi konsumsi, Indonesia berada

pada peringkat ke-26 di dunia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi di Indonesia. Peluang optimalisasi pemanfaatan gas bumi juga bisa dilihat dari sisi produksi. Indonesia sudah tidak lagi kaya akan minyak bumi. Kurangnya eksplorasi dan investasi di sisi produsen minyak bumi telah membuat produksi minyak bumi mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Namun, berbeda dengan kondisi produksi minyak bumi, pada periode yang sama produksi gas Indonesia masih stabil di atas 6.000 BBTUD.

## Hambatan optimalisasi pemanfaatan gas domestik

Meskipun terus meningkat, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri masih mengalami hambatan, antara lain dikarenakan mahalnnya harga gas bumi ketika sampai di tangan industri pengguna (hilir gas). Harga gas yang dibayar oleh industri pengguna bisa mencapai lebih dari dua kali lipat daripada harga pada kontraktor migas (hulu gas).

Terbatasnya infrastruktur distribusi gas bumi di Indonesia menjadi salah satu faktor mahalnnya harga gas di industri pengguna. Sumber-sumber gas bumi berada di kawasan lepas pantai dan lokasinya jauh dari pusat-pusat industri. Pusat produksi gas bumi Indonesia umumnya berada di lepas pantai, misalnya di Arun-Aceh, Bontang-Kalimantan Timur, serta Tangguh-Papua. Diperlukan infrastruktur terintegrasi untuk dapat menghubungkan gas bumi yang dihasilkan dengan pusat-pusat industri nasional. Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga menambah kompleksitas distribusi gas domestik. Kondisi-kondisi tersebut berujung pada mahalnnya harga gas yang harus dibayar pada industri pengguna.

## Insentif fiskal pemerintah

Permasalahan mahalnnya harga gas di tangan industri pengguna telah disadari oleh pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur harga gas bumi bagi industri pengguna dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai penetapan harga gas bumi domestik baik penetapan harga gas bumi secara umum maupun penetapan harga gas bumi tertentu untuk tujuh sektor yang masuk dalam daftar yang ditentukan pemerintah, antara lain: industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. Penetapan harga gas bumi tertentu menjadi senjata pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional.

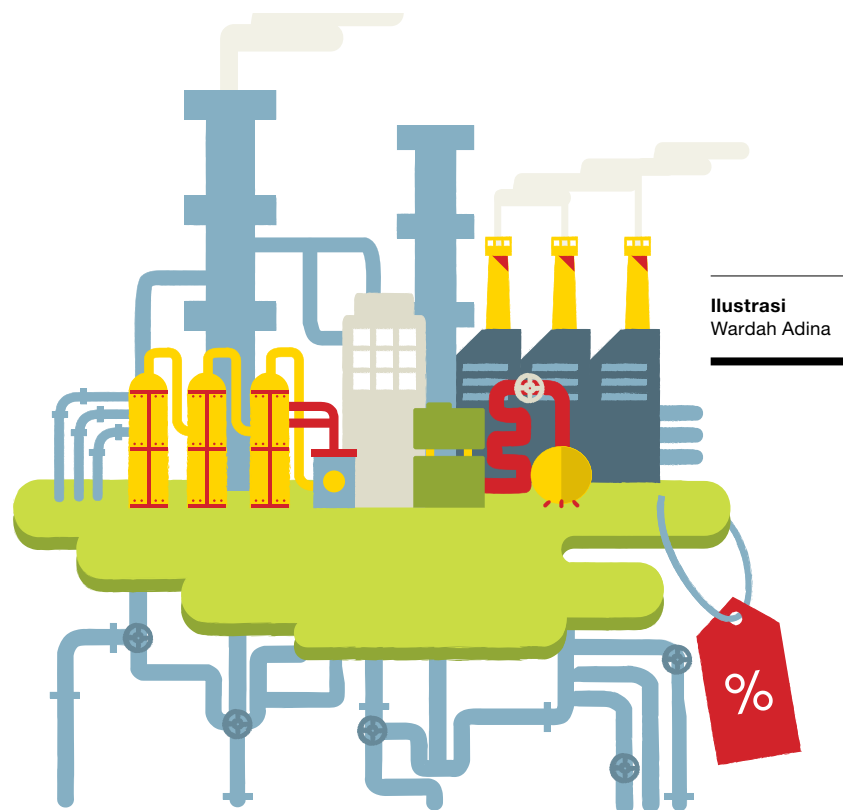
Ada dua jenis mekanisme pembelian gas yang diatur dalam penetapan harga gas bumi tertentu, yaitu mekanisme pembelian gas bumi langsung dari kontraktor migas dan mekanisme pembelian gas bumi melalui badan usaha gas bumi (melalui *distributor/trader*). Gas bumi yang dibeli dari kontraktor merupakan gas bumi yang langsung dibeli dari hulu/kontraktor migas. Dalam mekanisme tersebut, gas disalurkan melalui pipa ke industri pengguna. Industri yang menggunakan mekanisme tersebut antara lain industri pupuk dan pembangkit listrik. Tidak semua industri pengguna mempunyai kesempatan untuk membeli gas bumi langsung kepada operator migas. Hal ini dikarenakan lokasi industri yang berjauhan dengan sumber-sumber gas dan ketiadaan infrastruktur distribusi gas. Dalam kondisi tersebut

maka industri pengguna membeli gas dari distributor/trader gas.

Mekanisme penetapan harga gas bumi tertentu untuk industri pengguna diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. Untuk mendapatkan penetapan harga gas tertentu, industri pengguna mengajukan permohonan harga gas bumi tertentu kepada Kementerian ESDM (Lihat Gambar-1). Industri pengguna juga harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian. Berdasarkan permohonan dari industri pengguna, dan dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM lalu melakukan verifikasi. Proses verifikasi dilakukan terhadap harga beli gas bumi di titik serah kontraktor/produsen gas untuk menentukan pengurangan penerimaan migas pemerintah.

Pelaksanaan regulasi harga gas bagi industri manufaktur tersebut bukan tanpa biaya. Penetapan harga gas tertentu kepada pengguna gas bumi dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor dengan mengurangi bagi hasil migas pemerintah dalam kontrak bagi hasil produksi (PSC). Dengan mengurangi bagi hasil migas pemerintah, maka besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor migas tidak berubah. SKK Migas bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan pengurangan penerimaan migas negara tersebut. Berdasarkan perhitungan SKK Migas, penurunan bagi hasil pemerintah dari kontraktor migas bisa mencapai USD544 juta.

Selain dengan mengurangi bagi hasil migas pemerintah, masih ada upaya lain yang sedang dibahas untuk menurunkan harga gas di industri pengguna, antara



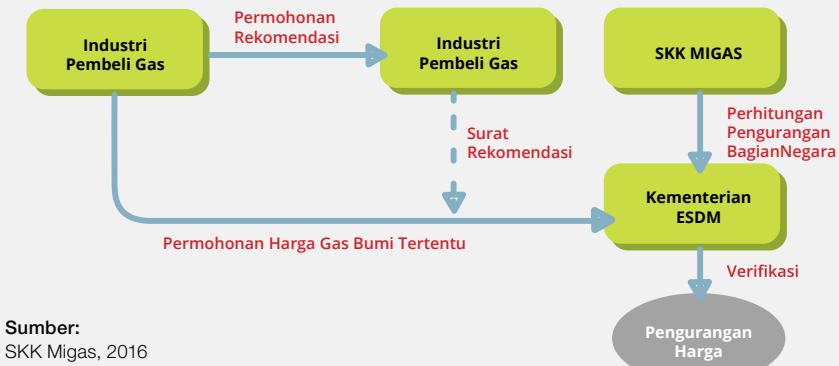
Ilustrasi  
Wardah Adina

lain dengan meningkatkan efisiensi biaya distribusi gas. Berdasarkan data dari SKK Migas, struktur biaya gas yang dibeli dari trader meliputi empat komponen sebagai berikut: harga gas hulu (60 persen), biaya distribusi (12-17 persen), toll fee/ biaya pipa (5-16 persen), dan margin trader (7-24 persen). Tidak efektifnya struktur biaya menjadi penyebab mahalnya harga gas di industri pengguna. Untuk meningkatkan efisiensi pada biaya distribusi gas, pemerintah tengah berusaha untuk melakukan pengaturan tata niaga gas. Berbagai kebijakan yang sedang digodok pemerintah antara lain pengaturan tarif penyaluran gas dan pengaturan margin dalam tata niaga gas. Intinya, tata niaga gas untuk mendapatkan harga gas domestik yang kompetitif perlu menyentuh seluruh lini, bukan hanya di sisi hulu atau hilir, melainkan juga di lini distribusinya.

Penutup

Realisasi pelaksanaan kebijakan harga gas bumi murah untuk pasar domestik sangat ditunggu oleh pelaku industri karena gas merupakan komoditas bahan baku dan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Penurunan harga gas bumi bagi industri domestik diharapkan akan meningkatkan daya saing yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Penggunaan gas bumi bagi industri domestik merupakan realita kebutuhan perekonomian domestik. Hal ini terutama karena sumber energi berbasis minyak sudah mengalami penurunan tingkat produksi

Gambar-1:  
Mekanisme Permohonan Harga Gas Bumi Tertentu



Sumber:  
SKK Migas, 2016

yang cukup besar dan berlangsung terus-menerus semenjak tahun 1990-an. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara penghasil gas bumi yang relatif besar. Namun, produksi gas selama ini lebih diorientasikan kepada tujuan ekspor. Pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi dari daerah penghasil dan daerah pengguna kurang mendapatkan perhatian. Ketika kebutuhan pasar domestik mengalami peningkatan maka efeknya harga beli gas bumi di level pengguna relatif mahal. Mahalnya harga gas bumi domestik, yang bagi industri bisa digunakan sebagai bahan baku antara atau sumber energi, akan membawa akibat tingginya harga output produksi. Efeknya daya saing harga produksi industri domestik menjadi kurang kompetitif. Kebijakan insentif dalam bentuk tata niaga harga gas domestik berusaha mengatasi hal ini, walaupun tentu dalam jangka sedang dan panjang

perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

Flavin, C., & Kitasei, S. (2010). The role of natural gas in a low-carbon energy economy. Washington, DC: Worldwatch Institute.

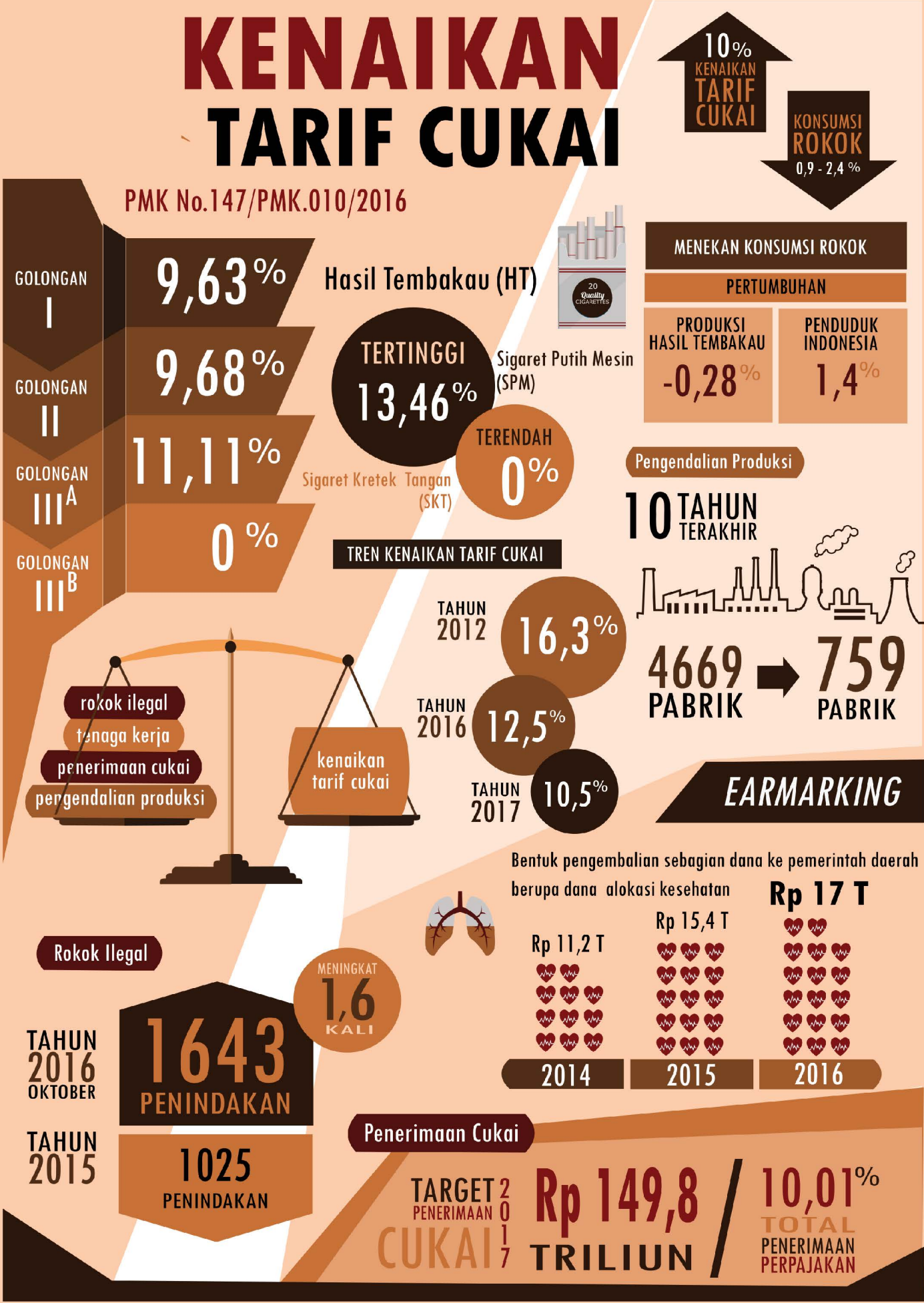
SKK Migas, Bahan Presentasi Oktober 2016. "Implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 dan Permen ESDM No. 16 Tahun 2016".

BP Group (2016). BP Statistical Review of World Energy. June 2016.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas

Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu

\*) peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal



# Raeni dan Becak Sang Bapak

Perjuangan Raeni menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang (Unnes) menjadi *headline* berbagai media nasional pada 2014. Dengan diantar ayahnya yang saat itu berprofesi sebagai pengayuh becak, Raeni berangkat wisuda. Dia lulus dari jurusan Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) dengan IPK nyaris sempurna, 3,96. Dua tahun berlalu, gelar S2 di bidang *International Accounting and Finance* berhasil diraih perempuan kelahiran Kendal, 13 Januari 1993 itu dari University of Birmingham, Inggris.

Raeni berangkat ke Inggris dengan Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) yang didanai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Sebelumnya, selama menempuh program S1, dia mendapatkan beasiswa penuh Bidik Misi. “Tanpa beasiswa, mungkin saya tidak akan kuliah,” kata Raeni dalam wawancara dengan Media Keuangan dua minggu setelah kembali ke tanah air sepulangnya dari Inggris. Saat dinyatakan diterima di Unnes, Raeni juga telah diterima bekerja di sebuah perusahaan sebagai tenaga akuntansi dengan berbekal ijazah Sekolah Menengah Kejuruan. Beasiswa Bidik Misi menjaga nyala mimpinya untuk berkuliah.

Raeni tidak malu diantar wisuda dengan becak sang bapak. “Pada saat itu saya ingin memberikan inspirasi kepada para penerima beasiswa Bidik Misi lainnya untuk tidak malu dengan kondisi keluarga,” ujar Raeni. Setelah pemberitaan yang masif, Raeni diundang oleh Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itulah keinginan Raeni untuk melanjutkan

studi S2 mulai menunjukkan jalan. “Presiden SBY memberikan apresiasi dan mendukung bila ingin melanjutkan pendidikan dengan skema BPRI,” katanya lagi.

Perjuangan panjang dilalui gadis Kendal itu sebelum akhirnya memulai studi di Birmingham pada September 2015. Dia mengikuti serangkaian proses seleksi LPDP, termasuk membuat *leadership project* yang di dalamnya mencakup kegiatan sosial di daerah Parung Panjang, Bogor. Syarat bahasa pun menjadi tantangan yang tidak mudah. Raeni harus mengikuti empat kali ujian sebelum nilainya memenuhi syarat universitas. “Sempat ada yang menyarankan agar saya menyerah saja



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2  
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710  
Telp/Faks. (021) 3846474  
E-mail. lpdp@depkeu.go.id  
Twitter/Instagram. @LPDP\_RI  
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI  
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

karena kehabisan waktu untuk mengikuti tes bahasa,” kata Raeni.

## Proses adaptasi

Di Birmingham, Raeni tinggal di rumah sebuah keluarga multikultural. Keluarga itu terdiri atas seorang ayah berkewarganegaraan Australia, ibu berdarah Indonesia, dan ketiga anak mereka yang dilahirkan dan tumbuh besar di Inggris. Yang menyenangkan. Raeni nyaris tak pernah menemukan kendala soal makanan di sana. “Saya sering makan rendang buatan Ibu,” kata Raeni.

Keluarga angkat Raeni di Inggris sangat mendukung studinya. “Saya meminta pertimbangan kepada mereka, misalnya *course* apa yang perlu saya

ambil dan bagaimana menyeimbangkan antara mata kuliah yang berat dan agak ringan. Supaya tidak berat semua,” ujarnya. Belajar di negeri yang asing memang menuntut Raeni untuk mampu beradaptasi. Pada masa permulaan kuliah, bahasa menjadi kendala utama. “Dosen saya mengatakan bahasa lokal saya masih sering terbawa,” ujar Raeni seraya tergelak.

Di samping itu, dia juga berusaha menyesuaikan diri dengan kultur di Inggris yang tidak mengutamakan *power structure* dalam berinteraksi di kampus. Pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa sangat egaliter. “Di sana *power structure* yang tinggi dianggap dapat mengurangi kemampuan berpikir mahasiswa,” katanya.

Dalam setiap *term* kuliahnya, Raeni sebetulnya hanya mengambil tiga mata kuliah. Namun, tugas-tugas yang diberikan dosen biasanya sangat banyak. Di kelas, dosen juga cenderung hanya memberikan *guideline*. “Kita harus mengasah *critical thinking* sendiri. Saya sempat menginap di perpustakaan beberapa kali untuk belajar dan mengejar *deadline* tugas,” kata Raeni.

Raeni tak puas belajar secara tekstual. Oleh karena itu, selain di dalam kelas, Raeni magang sebagai junior akuntan di College of Social Science di kampusnya. Dia ingin memahami akuntansi yang dipelajarinya langsung dalam praktek.

Mata kuliah yang sangat disukai Raeni adalah *Social Environmental Accounting*. Menurut Raeni, mata kuliah ini sangat penting dan masa depan implementasinya di Indonesia masih sangat cerah. Dalam mata kuliah tersebut, Raeni belajar bagaimana akuntansi bukan hanya diterapkan dari sisi ekonominya saja, melainkan juga dari sisi sosial dan lingkungan.

Di Indonesia, *Social Environmental Accounting* masih diterapkan secara terbatas pada pembukuan program *corporate social responsibility*. “Padahal di *developed country*, mereka sudah memperhitungkan, misalnya *carbon tax*, *fuel tax*, dan *environmental tax* lainnya sebagai bagian dari akuntansi dan keuangan perusahaan,” kata Raeni. Oleh karena itu, dia sangat mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan yang sedang membuat *roadmap* untuk program *sustainable finance*.

## Aktivitas organisasi

Selama setahun menimba ilmu di Inggris, Raeni harus pintar-pintar membagi waktu. “Saya berangkat ke kampus jam 7 pagi dan biasanya baru pulang ke rumah jam 11 malam,” ujarnya. Selain belajar di kelas dan magang, Raeni juga aktif dalam beberapa organisasi. *Pertama*, Raeni terpilih sebagai perwakilan mahasiswa di angkatannya. Sebagai perwakilan, Raeni harus mampu menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Keberadaan perwakilan sangat penting untuk bisa menyelenggarakan perkuliahan yang berkualitas. *Kedua*, Raeni juga mendapat amanat sebagai Sekretaris di Perhimpunan Pelajar Indonesia. *Yang ketiga*, dia juga aktif dalam kelompok pengajian setempat sebagai humas.

## Doa orang tua

Meskipun banyak kegiatan, Raeni tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di Kendal, Jawa Tengah. Sang ayah sampai menabung agar bisa membeli gawai yang *compatible* untuk layanan *videocall*. Sebelum berangkat kuliah, Raeni selalu menyempatkan diri berpamitan dengan kedua orang tuanya lewat layanan tersebut.

Perjuangan sang bapak dalam

kehidupan Raeni memang luar biasa. Setelah pemberitaan tentang mereka menjadi viral, ayahnya mendapat tawaran untuk mengantarkan anak Bupati Kendal ke sekolah setiap harinya. Seiring waktu, sang ayah tak lagi mengayuh becak. Kini dia menjadi mengantarkan anak Bupati tersebut dengan menggunakan mobil. Pada malam hari, ayahnya bertugas menjadi tenaga keamanan di SMK 1 Kendal. Sementara ibunya berjualan es di sekitar Taman Pendidikan Al Quran yang berlokasi di dekat rumah mereka.

Sebagai anak, Raeni mengaku belum banyak membahagiakan kedua orang tuanya. Apalagi jika mengingat segala perjuangan dan doa yang telah diberikan bapak dan ibunya. “Bapak selalu berpesan bahwa walaupun belum bisa memberikan apa-apa secara materi, tapi Bapak selalu berdoa untuk menjaga dan dengan doa-doa itu Bapak membantu saya mencapai cita-cita,” ujarnya.

## Harapan

Sebagai anak, Raeni berharap dapat membiayai kedua orang tuanya naik haji. Dalam segi karier, dia ingin membangun jaringan, baik di lingkungan akademik maupun masyarakat dengan aktif menjadi motivator dan relawan di dunia pendidikan. Saat ini, Raeni terdaftar sebagai dosen kontrak di Unnes dan relawan di sebuah komunitas pendidikan yang berbasis di Inggris bernama Dahuni Foundation.

Raeni juga masih mengejar mimpinya untuk melanjutkan pendidikan doktoral. Setelah berhasil lulus program S2 dengan predikat *distinction*, Raeni bercita-cita menjadi professor di bidang *social environmental accounting and finance*. “Harapannya semoga saya bisa menjadi pendidik yang mendidik dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan,” kata Raeni.

Teks Dwinanda Ardhi



# Bangun Kesadaran Pajak Lewat Branding

Teks Andi Zulfikar, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Albert Einstein pernah berkomentar bahwa hal tersulit untuk dimengerti di dunia adalah pajak penghasilan. Bila Albert Einstein diumpamakan sebagai Wajib Pajak (WP) di negerinya (ketika itu), maka pesan penting yang ingin ia sampaikan adalah menghitung pajak penghasilan seharusnya jauh lebih mudah. Rasanya, kita sering mendengar perkataan serupa di tanah air, meski pemerintah telah bersungguh-sungguh melakukan reformasi perpajakan.

Pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Artinya, masyarakat diberi kepercayaan untuk secara sukarela mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajaknya, menyetorkan pajak terutang, serta melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Bila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diumpamakan sebagai *brand* dan WP diumpakan sebagai konsumen, maka harus ada perspektif yang benar mengenai pajak dan DJP. Terlebih lagi, DJP juga bertugas meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Sebab itu, diperlukan beberapa strategi agar “*brand*” DJP dapat menarik WP untuk melaksanakan kewajibannya.

## Citra yang Melekat

*Branding strategies* adalah strategi-strategi untuk mewujudkan citra yang melekat dalam persepsi konsumen. Dalam perspektif *branding strategies*, ada tiga hal yang menarik konsumen untuk membeli produk yaitu ada manfaat yang dirasakan, mutunya konsisten, dan ketertarikan emosional. Contohnya, ketika seseorang membeli alat olahraga, dia akan lebih memilih produk yang terkenal berkualitas dibandingkan produk baru, walaupun bisa jadi kualitas kedua produk tersebut sebenarnya sama. Ketiga hal tersebut sesungguhnya juga bisa dipraktikkan dalam rangka menarik kesadaran WP untuk membayar pajak secara sukarela.

Pertanyaan yang bisa diajukan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak adalah apakah WP telah menyadari manfaat pajak bagi mereka, apakah mereka merasakan mutu

pelayanan yang konsisten, serta apakah ada hubungan emosional (misalnya dari sisi nasionalisme atau kepercayaan spiritual). Ketiga pertanyaan tersebut menjadi pondasi utama meningkatkan penerimaan pajak.

## Peran Sekolah dan Media

Pajak memang bermanfaat baik secara teori dan praktik. Namun pertanyaannya, apakah WP telah menyadari manfaat pajak? Disadari atau tidak, masa sekolah adalah masa untuk membangun karakter dan pemikiran seseorang. Sebab itu, sekolah berperan penting untuk memberi pemahaman mengenai pajak sejak dini. Bila setiap generasi menyadari bahwa mereka merasakan manfaat pajak dalam kehidupan nyata, maka akan timbul persepsi positif tentang pajak. Kurikulum pajak di sekolah tidak perlu mengajarkan cara membayar pajak, namun lebih menekankan apa manfaat pajak bagi mereka. Misalnya melalui jalan-jalan yang mereka lewati atau fasilitas umum yang mereka rasakan setiap hari.

Selain itu, media perlu didorong

untuk menyampaikan pemberitaan positif tentang pajak. Jika seseorang terus-menerus mendengar sisi negatifnya saja, maka hal tersebut akan melekat di benaknya dan berujung pada penghindaran pajak. Ada baiknya DJP mempunyai media sendiri atau paling tidak menayangkan manfaat pajak di media, terutama televisi. Rangkaian informasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pajak.

## Mutu Layanan

Secara umum, masyarakat sebenarnya telah merasakan peningkatan mutu pelayanan perpajakan. Sesuai dengan survei Bank Dunia mengenai kemudahan berusaha, posisi Indonesia naik dari peringkat 120 menjadi peringkat 109. Salah satu indikasi survei tersebut adalah pembayaran pajak.

Hanya saja, harus diakui bahwa membayar pajak bukan hal yang menyenangkan bagi sebagian orang. Oleh karenanya, sedikit saja pelayanan yang kurang bagus akan membuat WP mengeluh. Kadang-kadang, hal ini juga

manusiawi. Petugas pajak juga manusia yang mempunyai masalah hidup. Masalah tersebut mungkin saja terbawa ke dalam pekerjaan sehingga mempengaruhi mutu layanannya. Di sinilah Humas harus berperan untuk memberi informasi yang menarik dan konsisten mengenai sisi positif perpajakan.

Secara internal, organisasi sebaiknya memberi motivasi kepada pegawai melalui berbagai penghargaan. Artinya, bukan sekedar *punishment* yang terus menerus ditekankan, namun di sisi lain *reward* pun perlu diberikan. Dengan begitu, pegawai dapat bertugas dengan penuh rasa cinta pada pekerjaan. Pada akhirnya, pelayanan dari hati dapat dirasakan oleh masyarakat.

## Keterkaitan Emosi

Saat kemerdekaan baru saja direbut, rakyat Aceh berbondong-bondong menyumbangkan hartanya agar Indonesia bisa mempunyai pesawat angkut sendiri. Ternyata, rakyat yang rela berkorban untuk negaranya dengan dasar rasa cinta. DJP selaknyanya bisa menggunakan keterkaitan emosi agar WP

mau membayar pajak secara sukarela. Keterkaitan emosi itu harus dilakukan sejak dini baik melalui kurikulum sekolah, maupun pesan-pesan yang bermanfaat di media.

Salah satu pemahaman yang paling mendasar misalnya mengenai apa yang terjadi bila target pajak tidak terpenuhi. Contohnya peran pajak dalam postur APBN 2016 yakni Rp1.546,7 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun. Artinya, penerimaan perpajakan menopang 84,9 persen dari pendapatan negara. Bila penerimaan tersebut tidak tercapai, maka eksistensi negara terancam dan negara kita tidak dapat berdikari.

Ada juga motivasi lain, misalnya dari segi spiritualitas. Dengan membayar pajak berarti pembayar pajak telah membantu sesama. Motivasi berbuat baik terkadang lebih kuat daripada sekadar ancaman sanksi. Pajak adalah kebutuhan bangsa yang tidak dapat dielakkan. Oleh karenanya perlu upaya sungguh-sungguh untuk membangun citra positif tentang pajak melalui *branding strategies*.



Ilustrasi  
Wardah Adina

# Jaminan Penerbitan Obligasi Dorong Percepatan Pembangunan Tol Sumatera



Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.

Foto Dok. Biro KLI

Pembangunan infrastruktur adalah aspek vital pembangunan suatu negara, sekaligus menjadi salah satu prasyarat agar sebuah negara mampu menggerakkan roda perekonomiannya. Di tengah kondisi keterbatasan anggaran negara, peran sektor swasta menjadi begitu penting dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, untuk mendukung percepatan proses pembangunan infrastruktur, peran pemerintah tidak kalah penting. Salah satunya dengan memberikan jaminan penerbitan obligasi kepada badan usaha yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

**Meningkatkan Kelayakan Obligasi**

Pemerintah pada 2019 menargetkan salah satu mega proyek nasional, berupa pembangunan delapan ruas tol Trans Sumatera. Dalam rangka mempercepat

pembangunan proyek tersebut, Menteri Keuangan memfasilitasi pemberian jaminan penerbitan obligasi kepada PT Utama Karya (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pembangunan jalan tol tersebut meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera jo. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015. Sementara itu, dasar hukum pemberian penjaminan kepada PT Utama Karya (Persero) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol

di Sumatera.

Pemberian jaminan atas obligasi/surat utang ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penerbitan obligasi dalam rangka memperoleh pendanaan bagi percepatan pembangunan delapan ruas tol di Sumatera. Kebutuhan dana dalam pembangunan ruas tol Trans Sumatera diperkirakan mencapai Rp81 triliun dengan pendanaan ekuitas sebesar Rp52,6 triliun. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dengan badan usaha. Hal ini mengingat keterbatasan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimiliki pemerintah, sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam mendanai seluruh target pembangunan.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka penugasan BUMN menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan yang dipilih oleh pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Meski demikian, pihak badan usaha juga

memiliki keterbatasan, yaitu kebutuhan pendanaan ekuitas akibat dari rendahnya tingkat kelayakan finansial (FIRR). Hal ini mengakibatkan kemampuan proyek untuk melakukan *leverage* dengan cara melakukan pinjaman menjadi rendah.

Untuk itu, dengan tujuan mempercepat *leverage*, pemerintah memberikan jaminan penerbitan obligasi bagi badan usaha yang diberikan amanat untuk membangun proyek. Pemberian jaminan tersebut dapat mempermudah badan usaha yang ditunjuk untuk menerbitkan obligasi/surat utang korporasi sebagai bentuk *bridging financing*. Selanjutnya, penerbitan obligasi yang telah mendapatkan jaminan pemerintah tentunya dapat mengurangi risiko gagal bayar. Kondisi ini lebih mampu menarik investor agar bersedia membeli obligasi/surat utang tersebut.

**Proses Penerbitan Obligasi**

Pemberian jaminan pemerintah atas penerbitan obligasi oleh PT Utama Karya dilakukan berdasarkan tahapan proses penerbitan surat utang yang berlaku. Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan pemberian jaminan pemerintah, penandatanganan surat persetujuan prinsip, dan surat jaminan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan, tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tidak terikat untuk melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga berlaku efektifnya jaminan.

Jaminan penerbitan obligasi dilakukan baik melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum.

Selanjutnya, jika terjadi risiko gagal bayar, maka pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan. Namun, penjaminan akan diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesinambungan fiskal, sejalan dengan pengelolaan risiko APBN. Dengan demikian, ada batasan maksimal penjaminan yang penetapannya dilakukan secara berkala. Namun, penjaminan bersifat menyeluruh yang meliputi pokok dan bunga obligasi yang jatuh tempo, serta denda keterlambatan.

**Penutup**

Pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur pemerintah periode 2015-2019 dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Hal ini memerlukan pendanaan yang cukup besar. Sebagaimana proyek pembangunan jalan tol Sumatera, alokasi dana APBN tidak mampu mendanai seluruh target pembangunan. Oleh sebab itu, penugasan BUMN menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha perlu dibuat. Hal ini demi menjaga kelangsungan dari badan usaha sebagai pelaksana dalam penugasan penyelesaian proyek. Sementara itu, pemerintah harus selalu menilai *feasibility study* pembangunan infrastruktur dan mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kualitas maupun ketepatan waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur dapat terjaga, sehingga *leverage* dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

**Teks** Budi Sulistyو

# Bahagia Saat Membahagiakan Orang Lain

Modal nekat tak selamanya berujung buruk. Kenekatan Rian memang tak biasa. Sebuah madrasah untuk anak-anak didirikan sebagai wujud nyata impian kecilnya.



Rian Adiputra tak pernah mengira, kemandirian dan kepercayaan yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil akan membawa manfaat besar. Pemuda yang aktif berolahraga dan menjadi langganan juara berbagai turnamen ini tak pernah berpuas diri dengan capaian yang dimiliki. Baginya, harta dan ilmu tidaklah membuat seseorang menjadi tinggi derajatnya. Justru ketika berbagi pada orang lain, kekayaan itulah yang paling hakiki. Rian, sapaan akrabnya, memulai semua pencapaiannya dengan penuh perjuangan. Mulai perjuangan menerobos seleksi STAN hingga mendirikan sebuah taman pendidikan gratis bagi anak-anak.

**Bermodal kelinci**

Sejak kelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama), pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok ini gemar

memelihara kelinci. Memelihara kelinci bukan hanya sekedar hobi, ia menemukan suatu peluang. Bermodalkan uang Rp15.000, ia membeli dua ekor kelinci. Setelah berkembang biak hingga 30 ekor, Rian menjual semua kelincinya dan sebagai gantinya ia membeli dua ekor kelinci Australia.

Melihat prospek yang besar, Rian semakin giat berternak kelinci Australia. Sebuah harapan pada hasil ternak kelinci mengingatkan pada impiannya menjadi polisi atau prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia). Suatu hari di saat sedang mengurus kelinci, Rian berdoa sembari memandang langit dan berkata, “Seandainya nanti saya lulus SMA (Sekolah Menengah Atas), saya akan mendaftar POLRI atau TNI dengan uang saya sendiri,” tuturnya kala itu.

Setelah lulus SMAN 1 Salaman, pria kelahiran Purworejo, 9 Oktober 1993 ini benar-benar menunaikan janjinya.

Ia hanya menyisakan 15 dari total 100 ekor kelinci, selebihnya dijual untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Uang hasil menjual kelinci sebesar kurang lebih Rp10 juta ia gunakan untuk mendaftar ke berbagai sekolah tinggi kedinasan, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Akademi Militer, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, hingga mengikuti ujian SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Singkatnya, perjuangan Rian untuk menembus seleksi sekolah kedinasan tersebut harus terhenti. Hingga akhirnya ia mencoba ajakan teman untuk mendaftar di Akademi Teknologi Kulit, Kementerian Perindustrian Yogyakarta. Setahun menjalani kuliah, Rian kembali mencoba seleksi IPDN. “Saya memang bercita-cita menjadi siswa sekolah semi militer,” ujarnya sembari tersenyum. Tak berselang jauh setelah itu, Rian mendaftar



Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan sukses menembus tahapan seleksi dengan baik.

**Keluarga baru di TPA Al-Hikmah**

Muda, cerdas, dan penyuka tantangan. Itulah gambaran dari pria yang aktif di kegiatan Pramuka, Tonti (Pleton Inti), dan Karang Taruna saat SMA ini. Selepas SMA, ia telah memiliki sebuah konsep kegiatan sosial. Di usianya yang kala itu baru berusia 19 tahun, ia bertekad membangun sebuah Taman Pendidikan Alquran (TPA) di kampungnya. Bisa dibilang keinginan membangun TPA atau madrasah untuk anak-anak itu merupakan suatu hal yang nekad. Tapi kenekadan yang dilakukan Rian bukan omong kosong belaka. Keinginannya itu dituangkan dalam dua lembar kertas proposal yang dibagikan dari pintu ke pintu di lingkungan kampung halamannya di Purworejo, Jawa Tengah.

Setelah melakukan pengenalan kepada masyarakat sekitar, Rian berhasil mendapat 56 calon santri TPA Al-Hikmah. Nama Al-Hikmah diambil dari nama musholla yang menjadi pusat lokasi belajar para santri. Selanjutnya, Rian membentuk kepengurusan TPA Al-Hikmah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan dua orang guru. Sebagai ketua, Rian sempat kesulitan mencari figur yang cocok untuk dijadikan wakil ketua. Hingga

akhirnya ia memberikan amanah tersebut pada salah seorang kerabatnya yang kala itu masih duduk di kelas 3 SMP. “Wakil ketua saya memang masih muda. Tapi dari segi pemahaman agama bila dibandingkan dengan anak seusianya, dia istimewa,” jelas pria yang sukses meraih Juara I Voli pada Hari Oeang Tahun 2015 dan Juara I Voli Antarkanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2016.

Begitulah akhirnya sebuah pendidikan agama untuk generasi muda bangsa itu dimulai di sebuah mushalla bernama Al-Hikmah. Semangat belajar para santri selalu membuat Rian kian bersemangat memberikan pengajaran terbaik. Kini, aktivitas pulang pergi Jakarta-Purworejo merupakan rutinitas yang harus dijalani Rian setiap dua minggu sekali. Waktu yang singkat di kampung halaman digunakan untuk melakukan rapat dengan pengurus TPA, mengajar dan menyapa para santri, serta terus mengembangkan kurikulum beserta rencana kegiatan ke depan. Kini, santri TPA Al-Hikmah berjumlah 100 orang yang dibagi menjadi empat kelas.

Sejak awal, tak ada yang memaksa Rian untuk melakukan mendirikan TPA Al-Hikmah. Sejak berdiri pada Desember 2012 hingga saat ini, tak sepeserpun dana yang diminta dari para santri. Mereka tak hanya mendapat pendidikan secara cuma-cuma, namun juga dorongan motivasi dan

kepercayaan diri untuk menjadi manusia pembelajar hebat di zamannya kelak. Anak-anak juga didorong untuk mengikuti berbagai lomba keagamaan tingkat anak-anak yang diselenggarakan perangkat desa setempat..

Salah satu pencapaian TPA Al-Hikmah yaitu dengan diselenggarakannya peringatan Milad (hari lahir) TPA Al-Hikmah yang ke-3. Acara dibungkus dengan mendatangkan ustadz dari Yogyakarta yang dibarengi dengan khataman kitab para santri dan parade *drumband* keliling kampung. “Kami mengumpulkan dana dengan berjualan kaligrafi, stiker, dan kalender. *Alhamdulillah* semakin banyak masyarakat yang mengenal kami,” kata pemilik akun sosial media Instagram @Adiputra\_rian ini. Sejak itu, jumlah santri TPA Al-Hikmah terus bertambah hingga kini.

“Anak adalah aset. Ketika kita menyepelekan aset, maka itu sama dengan saham yang menurun,” jelas Rian saat memberikan sambutan pada Milad TPA Al-Hikmah ke-3 pada Desember 2015 lalu. Ke depan, Rian berharap TPA Al-Hikmah bisa menjadi sebuah yayasan yang memiliki pendanaan yang kuat dan mandiri, serta bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Teks** Pradany Hayyu

## Meranggas Bukan untuk Mati

Intensitas hujan yang sering terjadi belakangan, cukup menjadi penyejuk yang mengimbangi dampak terik matahari di musim kemarau lalu. Rumput yang semula terlihat mengering, kini tampak menghijau. Sementara tumbuhan kayu yang semula meranggas, kini mulai menumbuhkan daunnya.

Demikianlah proses kehidupan. Untuk mempertahankan hidupnya, tumbuhan juga melakukan upaya penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Saat musim kemarau datang dan ketersediaan air tanah mulai menipis, misalnya, tumbuhan kayu seperti pohon jati akan menggugurkan daunnya satu per satu hingga gundul.

Ya, pohon jati yang semula rimbun akan meranggas. Hal ini dilakukan untuk sekadar mengurangi penguapan yang terjadi. Namun, keadaan ranggas ini bersifat sementara, hingga datangnya musim hujan. Air hujan, menjadi sebab bagi pohon jati untuk bisa mengembalikan

daun-daunnya yang telah gugur.

Pengetahuan mengenai kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya telah kita pelajari sejak lama, bahkan sejak di bangku sekolah dasar. Namun, acap kali kita terlupa untuk memaknai kemampuan adaptasi pohon jati dengan kesanggupan kita melakoni kehidupan. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari proses adaptasi ini. Sebab alam semesta dan seisinya diciptakan Tuhan bukan tanpa alasan. Ada beragam pesan dan petunjuk bagi manusia untuk setiap fenomena alam yang terjadi. Sesederhana apapun itu.

Kekokohan dan kerindangan pohon jati tak jarang dijadikan sebagai tempat berteduh. Demikian pula lazimnya seseorang yang diberi keluasan rezeki. Tidak jarang menjadi tempat bersandar bagi orang di sekitarnya. Namun kita tahu, kemudahan dan kesulitan hidup datang silih berganti, berputar layaknya sebuah roda.

Pada kenyataannya, keadaan tidak

melulu dapat berdamai dengan hasrat manusia. Mereka yang berkelebihan materi, sangat mungkin suatu saat mengalami kekurangan. Mereka yang berada di puncak posisi, suatu saat bisa jatuh ke posisi terendah. Maka, pada saat itulah, perilaku pohon jati bisa menjadi teladan. Beragam keinginan harus bisa diluruhkan. Penghematan dan kesederhanaan tidak lagi bisa dihindari demi menyasati keadaan yang sulit tadi. Hal ini layaknya pohon jati yang menahan batangnya agar tidak semakin besar di musim kering.

Bukanlah sesuatu yang sia-sia untuk menyasati kehidupan dengan keteguhan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Sebab pada hakikatnya, musim akan berganti dan roda kehidupan akan terus berputar. Keindahan akan datang kembali pada waktunya. Bergantung bagaimana kita menyikapi keadaan. Layaknya pohon jati di musim kemarau yang meranggas, bukan untuk mati.

Teks Titi Susanti



**Judul:** Generasi Langgas: Millennials Indonesia  
**Pengarang:** Yoris Sebastian, Dilla Amran & Youth Lab  
**Penerbit:** Gagas Media  
**Kota Terbit:** Jakarta  
**Tahun Terbit:** 2016  
**Deskripsi Fisik:** 193 halaman  
**ISBN:** 9789797808716

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemenkeu

Perpustakaan Kementerian Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

### 5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 **The Summons: Panggilan**  
John Grisham
- 2 **Critical Eleven**  
Ika Natassa
- 3 **Cinta Untuk Cece**  
Beth Hoffman
- 4 **Supernova : Intelligensi Embun Pagi**  
Dee Lestari
- 5 **Mereka Bilang Saya Monyet**  
Djenar Maesa Ayu

### 5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 **Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah**  
Boediono
- 2 **Generasi Langgas: Millennials Indonesia**  
Yoris sebastian, Dilla Amran & Youth Lab
- 3 **Teori Makroekonomi Edisi Kelima**  
N. Gregory Mankiw
- 4 **Pegantar Ilmu Kriptografi, Teori, Analisis, dan Implementasi**  
Dony Ariyus
- 5 **Statistical Techniques in Business and Economics**  
Douglas A. Lind

## Generasi Langgas: Millennials Indonesia

Sempat bingung dan penasaran mencari padanan kata langgas. Sampai akhirnya ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti kata langgas yaitu tidak terikat kepada sesuatu atau kepada seseorang (bebas). Istilah langgas sendiri dikenalkan kembali oleh surat kabar Kompas tahun 2015 dan 2016 pada setiap kali menyambut Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Lantas, siapa kah generasi langgas? Generasi langgas juga disebut sebagai generasi millennials (generasi Y), yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1980 hingga 2000 yang saat ini berusia 16 hingga 36 tahun.

Dalam buku ini, generasi langgas bukan berarti generasi instan, mereka hanya menggunakan cara yang tidak biasa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditugaskan. Generasi langgas bukan berarti manja dan ingin selalu diberikan contoh, mereka hanya ingin membuat sesuatu yang lebih baik dari produk sebelumnya. Pimpinan generasi langgas, baik dari generasi X ataupun generasi *baby boomer* menganggap generasi ini tidak mau susah, tidak mau banyak belajar, dan inginnya serba cepat. Anggapan tersebut tidak semuanya benar. Generasi langgas hanya tidak ingin mengulang kesalahan generasi sebelumnya, maka mereka selalu meminta contoh agar tidak membuang waktu dan tenaga dalam setiap pekerjaan.

Buku ini terbagi dalam beberapa bab, diantaranya bab bebas belajar, bebas bekerja, bebas berbisnis, menjadi tenaga lepas, mengatur keuangan, serta sayang dan dekat dengan orang tua yang disertai contoh dan kisah-kisah sukses. *Passion* terhadap pekerjaan membuat generasi kreatif ini ingin terus mengerjakan hal berbeda, tapi tetap memiliki manfaat jelas dan berdampak positif untuk lingkungan. Bagi generasi langgas, prosedur kadang menjadi rintangan dalam berkarya. Namun, mereka tetap berproses dengan gaya yang mereka kembangkan sendiri.

Proses pembuatan buku ini dikerjakan melalui riset yang cukup serius dari generasi langgas yang tersebar di lima kota di Indonesia, mulai dari Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, dan Makasar. Desain sampul buku amat sangat personal, sampai-sampai sang penulis meminta pembaca untuk turut serta mengirimkan foto pembaca bersama *cover* buku generasi langgas yang sudah ditempel stiker melalui media sosial instagram dengan tagar #GenerasiLanggas. Penulis menyimpulkan buku ini dengan apik, bahwa generasi langgas diharapkan mampu menjadi generasi emas bila mampu memahami kekuatan karakter mereka. Generasi emas sangat dibutuhkan untuk membangun era Indonesia Emas di masa depan.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

# Jatuh Hati Pada Suka Hati



Pontianak dikenal sebagai kota khatulistiwa. Hal ini karena letak geografisnya yang tepat berada pada garis lintang nol derajat area lintas matahari. Jika kita menyusuri Jalan Tanjungpura yang berada di jantung kota, akan nampak deretan ruko kecil berfasad kuno. Di sinilah letak Warung Minuman Suka Hati, salah satu destinasi kuliner Pontianak yang melegenda.

Waktu menunjukkan pukul empat sore ketika saya dan teman-teman tiba di sana. Aroma pisang di wajan yang bercampur dengan wangi kopi memenuhi ruangan. Warung Suka Hati sangat sederhana, namun tak pernah sepi oleh pengunjung. Di sini hanya tersedia sepuluh buah meja yang dapat menampung paling banyak 30 pengunjung. Suasananya akrab, khas warung kecil. Bagi kebanyakan orang, tujuan utama ke warung kopi memang bukan sekedar ngopi, tapi untuk mengobrol.

Sambil menunggu pesanan, saya mendekati peracik kopi. Ada yang menarik di sana yakni teko kuno dengan peringatan 'AWAT PANAT' atau 'awas panas' yang dilafalkan kurang sempurna oleh pendiri warung. Meski tak ada yang istimewa dari cara meracik kopi, namun kelihaian peracik dalam menyiapkan kopi memiliki daya pikat tersendiri. Dengan lihai tangannya berpindah-pindah dari menyeduh dan menyaring kopi, menuangkannya ke dalam beberapa gelas sekaligus, dan lantas menuangkan gula tanpa tumpah sedikitpun. Peralatan yang

digunakan kelihatan tua karena warung ini sudah berdiri lebih dari tujuh puluh tahun.

Tak perlu lama menunggu, kopi tubruk dan pisang goreng diantar ke meja kami. Kopi disajikan dalam gelas kecil berukuran 200ml, bersama dengan sendok bebek untuk menyeruput. Kopi yang disuguhkan sudah disaring, sehingga tidak ada ampasnya. Harganya sangat bersahabat, hanya Rp6000 per gelas. Namun, rasanya dapat disandingkan dengan kopi ala gerai kopi internasional. Kopi yang digunakan berasal dari Sungai Ambawang dan Punggur, daerah penghasil kopi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Sebenarnya menu andalan warung ini adalah pisang gorengnya. Tidak seperti pisang goreng pada umumnya yang hanya dibalut tepung renyah, pisang di warung ini juga dibaluri dengan selai serikaya. Saya sengaja memesan satu porsi pisang dengan olesan selai di atasnya dan satu porsi tanpa selai agar bisa memberikan perbandingan. Keduanya sama-sama enak. Namun pisang goreng serikaya memang juara. Tekstur serikayanya lembut dengan rasa manis yang pas di lidah. Cukup dengan Rp8000 saya sudah bisa menikmati dua potong pisang serikaya.

Pemilik warung sengaja memilih pisang nipah yang juga berasal dari Kabupaten Kubu Raya. Dalam penilaiannya, jenis pisang inilah yang paling cocok disantap sambil menghirup kopi. Warung Suka Hati membuat selainya sendiri menggunakan bahan asli yaitu serikaya, telur bebek, dan gula. Jika ingin membawa pulang, selai ini juga tersedia dalam kemasan mangkuk plastik kecil dengan harga Rp25.000 ribu. Namun harus diingat, selai serikaya Suka Hati hanya tahan satu minggu karena tidak menggunakan pengawet.

Warung Suka Hati menjadi tempat berbaurnya beragam kalangan dengan beragam kelas sosial dan ekonomi. "Warung ini sudah menjadi langganan sejak zaman kakek saya. Suasananya santai dan makanannya enak, makanya saya terus datang kembali" kata Budi, salah satu pengunjung yang saya jumpai. Jika penasaran ingin berkunjung, Warung Sukahati buka sejak pukul 05.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB.

**Teks dan Foto** Bagus Wijaya



## Work Life Balance

**S**elepas Pemilihan Puteri Indonesia 2008 dan ajang Miss Universe 2009, Zivanna Letisha ingin berbagi pengalaman hidupnya. Berawal dari *power of dream* saat masih duduk dibangku sekolah menengah pertama, Zizi begitu ia disapa, bermimpi memiliki karya hasil tulisannya sendiri, khususnya mengenai *self motivation*.

Walhasil, di tahun 2013, Zizi menelurkan karya bertajuk 'Buku Pintar Cewe Juara' yang bertujuan memotivasi para wanita. Menurut Zizi, seorang wanita tidak harus menjadi Putri Indonesia atau harus mengikuti kompetisi untuk dapat memiliki mahkotanya sendiri. "*Everybody is Princess*," ungkapnya saat acara Festival Literasi Perpustakaan di Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga senang melihat orang lain berkembang. "Orang yang pintar tidak boleh pintar sendiri. Orang yang punya pengalaman tidak

boleh punya pengalaman sendirian. Orang yang tahu sesuatu tak boleh tahu sendirian. Kalau semua orang berkembang dan maju bersama-sama, itu akan menjadi sangat bagus", ujarnya.

Apiknya mengatur jadwal kegiatan sehari-hari yang cukup padat menjadi bekal selanjutnya bagi wanita kelahiran Jakarta 16 Februari 1989 ini kembali menciptakan sebuah tulisan. Karyanya yang berjudul 'Trik Juara Mengatur Waktu' berupaya memberikan tips dan trik mengelola waktu dari wanita yang kerap berprofesi sebagai presenter televisi ini.

Zizi memandang bahwa '*time you enjoy wasting is not wasted at all*'. Bagi Zizi, seseorang bisa memanfaatkan waktunya dengan menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Salah satu hasil riset yang dituangkan dalam bukunya membuktikan bahwa seseorang yang telah merencanakan kegiatan akhir pekannya dengan baik maka hasilnya akan lebih positif.

Ini karena ia merasa telah melakukan

hal yang produktif *in fun on the positive way*. Bagi sebuah keluarga, lanjut Zizi, disarankan untuk merencanakan agenda liburan, seperti jalan-jalan ke luar kota. Kegiatan ini penting untuk menciptakan kebahagiaan tidak hanya bagi orang tua melainkan juga untuk anak-anak mereka.

Selain itu, kesibukan penduduk ibu kota yang bekerja di depan layar komputer menelisik penggemar *jogging* ini untuk mendorong para pembacanya rutin melakukan kegiatan fisik demi kesehatan. Hubungan dengan mengatur waktu, katanya, bukan berarti harus produktif dan menghasilkan karya.

"Keseimbangan *body, mind*, dan *soul* penting banget. Semakin muda kita mulai membiasakan diri mengisi (waktu) dengan sesuatu yang bermanfaat akan membentuk kebiasaan yang baik untuk kedepannya. Apapun yang terjadi di keseharian kita, kita akan merasa bersyukur atas yang kita dapat karena kita seimbang dan bisa *work life balance* dalam menjalani hidup," tuturnya.

Teks Krisna Pandu Pradana



Foto  
Dok. Pribadi



## Bung Piskal

CERITA: WARDAH GAMBAR: BIMO



**SELAMAT  
NATAL**



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

photo: Anas Nur Huda